

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 171 ayat 1 dan 2, bahwa arah kebijakan RPJPD merupakan prioritas Pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun yang di jabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon kepala daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenan. Olehnya Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, merumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman pada Prioritas dan Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJPN.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi untuk pencapaian tujuan.

Penetapan tahapan dan skala prioritas harus mencerminkan permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan waktu. Meskipun penekanan prioritas setiap tahapan berbeda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan permasalahan pokok dari analisis capaian pembangunan daerah pada pada Bab II. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan harus

dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah Kebijakan Transformasi Daerah di sesuaikan dengan Arah Kebijakan Transformasi sesuai lampiran Buku II SEB Penyelerasan sebagai penerjemahan arah pembangunan wilayah dalam Bab V RPJPN Tahun 2025 – 2045. Dibawah ini merupakan Arah Kebijakan tranformasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2045 sebagaimana penjelasan diatas, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
1.	Transformasi Sumber Daya Manusia Yang berdaya Saing	STE 1. Kesehatan Untuk Semua	1. Percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular seperti malaria dan sistosomiasis melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.
			2. Dukungan Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3TP
			3. Dukungan Pengembangan sistem telemedicines yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).
			4. Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk wilayah kepulauan dengan moda yang sesuai

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			dengan karakteristik alam.
			5. Penguatan fondasi pemenuhan pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial) serta peningkatan SDM berkualitas), dengan fokus pada upaya:
			6. Penguatan ketahanan dan keamanan kesehatan melalui pencegahan deteksi dan respon terhadap kedaruratan kesehatan serta dampak perubahan iklim
			7. Mencapai pertumbuhan penduduk yang proporsional serta seimbang
		STE. 2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	8. Membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta inovasi
			9. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
			10. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kekerjaan tinggi.
			11. Dukungan Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah seperti pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			12. Dukungan Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.
			13. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI.
			14. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.
			15. Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik serta Pemerataan distribusi tenaga pendidik (guru)
			16. Penguatan pendidikan non formal
			17. Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
		STE. 3 Perlindungan sosial yang adaptif	18. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi 3T melalui

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
			19. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk;
			20. Memastikan perlindungan social berkeadilan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan Pendidikan, Kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan social serta perlindungan dari kekerasan;
			21. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
			22. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
			23. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			<p>24. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10 persen penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.</p> <p>25. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</p> <p>26. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.</p>
			<p>27. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia</p>

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			usaha dalam penyediaan perumahan
			28. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
2	Perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	STE. 4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral seperti nikel dan bijih logam, serta peningkatan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.
			2. Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor pertanian, perkebunan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pariwisata).
			3. Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif
			4. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan,
			5. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.perkebunan, perikanan,

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			pertanian, dan pariwisata.
			6. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.
			7. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
			8. Peningkatan pengembangan IPTEKIN menuju komersialisasi oleh industri.
			9. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.
		STE. 5 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	10. Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya).
			11. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan.
			12. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism).
			13. Pengembangan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah.

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
		STE. 6 Transformasi Digital	<p>14. Dukungan Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. b. peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran).
			<p>15. peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital</p>
			<p>16. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk : (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit Listrik dan</p>

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			<p>pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p>
		STE. 7 Integrasi Ekonomi Domestik	<p>17. Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>18. Pemanfaatan Kawasan Industri dan KEK Palu untuk pengembangan industry pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan.</p>

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			19. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
			20. Dukungan Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.
			21. Pengendalian inflasi daerah
			22. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan dalam proses penyediaan perumahan.
		STE. 8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi	23. Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif
			24. Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
			25. Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah.
			26. Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
3	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	STE. 9 Regulasi dan Tata Kelola yang berintegras dan adaptif	1. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
			2. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
			3. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
			4. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
			5. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
			6. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
			7. Mendukung peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
			8. Penguatan integritas partai politik
			9. Penguatan dukungan dalam

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro	STE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Provinsi Tangguh, dan Demokrasi Substansial	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal, khususnya di Kawasan Industri baru.
		STE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	2. Penguatan Pengendalian inflasi daerah
			3. Penguatan fondasi transformasi ekonomi yang mendukung stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui bauran kebijakan fiskal, sistem pembayaran, dan sektor keuangan.
			4. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		STE. 12 Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan	5. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial
	Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	STE. 13 Beragama Masalahat dan Berkebudayaan Maju	1. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
5			karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak.
			2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
			3. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
			4. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama
		STE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	5. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan
			6. Perubahan gaya hidup masyarakat berkelanjutan
			7. Peningkatan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis
		STE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	8. Peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang terintegrasi.
			9. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			teknologi.
			10. Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
			11. Mendukung reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
			12. Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa Kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau
			13. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
			14. Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
			15. Mendukung Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang. pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang 16. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Provinsi Sulawesi Tengah.
			17. Mendukung ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW (Food, Energy, and Water) Nexus.
		STE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	18. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim.

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			19. Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas.
			20. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif
			21. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat
			22. Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan
			23. Penerapan upaya konservasi air hujan untuk pemenuhan kebutuhan air domestik
			24. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan fungsionalisasi area tangkapan air baru
			25. Peningkatan kualitas air agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian
			26. Penambahan jumlah jaringan distribusi air
			27. Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air
			28. Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pada aktivitas hulu (seperti pertanian) maupun industry

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air
			29. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting
			30. Peningkatan pendidikan lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan dan hemat air
			31. Kapasitas prasarana air baku perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri
			32. Menegakkan regulasi dan kearifan lokal untuk kepastian perlindungan sumber air
			33. Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk pengendalian banjir dan seperti perkuatan tanggul alami di sungai
			34. Pengembangan Flood Forecasting Warning System.
		STE 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	35. Pengurangan risiko abrasi di pesisir dan kepulauan.
			36. Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim.
			37. Pewujudan pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.
			38. Penguatan manajemen bencana , mencakup mitigasi struktural dan non struktural, ke siapsiagaan, tanggap

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			<p>darurat, dan pemulihan pasca bencana.</p> <p>39. Penguatan dan pemanfaatan teknologi untuk mitigasi dan resiko bencana</p> <p>40. Pembatasan Pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana tinggi dan sangat tinggi</p> <p>41. Peningkatan sistem jaringan regional pada kawasan rawan bencana rendah dan kawasan bencana sedang</p> <p>42. Pengembangan kota palu sebagai kota taman bumi atau Palu Geoprak city dengan fungsi utama perdagangan, jasa dan industri, pendidikan dan riset kebencanaan, unggulan pariwisata berbasis geowisata dengan mitigasi bencana (Ripparkot Palu)</p> <p>43. Mendorong pengembangan wilayah melalui pembentukan otonomi baru</p>
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	STE. 8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi	<p>1. Mendukung pengembangan Pelabuhan Pantoloan dan pelabuhan lainnya untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi untuk di Kawasan Timur Indonesia.</p> <p>2. Mendukung pemanfaatan ALKI II di sisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.</p>

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			<p>3. Mendorong Pengembangan Wilayah melalui pembentukan otonomi baru</p> <p>4. Dukungan pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda.</p> <p>5. Dukungan pengembangan bandara utama Mutiara SIS Al-Jufri serta bandara lainnya dan integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane termasuk untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas.</p> <p>6. Mendukung penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara).</p> <p>7. Mendukung pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang.</p> <p>8. Sulawesi Tengah Sebagai Daerah Mitra IKN</p> <p>9. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah PASIGALA (Kota Palu,</p>

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			<p>Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi): (i) Pengembangan kawasan pemukiman penyangga disebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala, (ii) Peningkatan sistem jaringan pergerakan regional, (iii) Pengembangan sarana dan parasarana pemukiman regional di Kabupaten Donggala, (iv) Pengembangan jaringan sumberdaya air sebagai pengurangan resiko bencana likuifaksi</p> <p>10. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Agropolitan Bolipamuso dan KPN: (i) Hulu pengembangan pertanian berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, sebagian Kabupaten Sigi, sebagian Kabupaten Parigi Moutong, dan sebagian Kabupaten Donggala; (ii) Hilir produksi pertanian berupa pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasaran berada di pusat kegiatan yaitu Parigi Moutong sebagai agroindustri; dan Poso sebagai sentra agribisnis dan sentra agrowisata.</p> <p>11. Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara;</p> <p>11. Pengembangan infrastruktur pendukung agropolitan, agroindustri, agribisnis dan agrowisata.</p>

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			<p>12. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Balatoju (sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-Una) (i) Peningkatan kualitas obyek wisata bahari; pengembangan Kepulauan Togean sebagai Kawasan Destinasi Super Prioritas Nasional dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis pengurangan risiko bencana; (ii) Pembuatan suatu paket terintegrasi antar wilayah melalui peningkatan jalur pelayaran; (iii) Penetapan kawasan perlindungan setempat; (iv) Perlindungan dan pengawasan terhadap potensi ekowisata bahari; (v) Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang sebagai upaya pengurangan risiko bencana tsunami; dan (vi) Peningkatan sarana prasarana pengembangan potensi perikanan dan pengolahannya.</p>
			<p>13. Penguatan Sektor Pertanian, Peningkatan produktivitas sektor Perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi Pembangunan IKN.</p>
			<p>14. Mendukung peningkatan pelaksanaan reforma agraria</p>
			<p>15. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan.</p>
			<p>16. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang</p>

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			berketahanan bencana dan iklim. 17. Mendorong pembangunan terusan khatulistiwa.
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	STE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	<p>1. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>2. Mendukung optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.</p> <p>3. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.</p> <p>4. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui system terpusat di wilayah perkotaan.</p> <p>5. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum</p> <p>7. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.</p> <p>8. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan</p>

No.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045
			<p>perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.</p> <p>9. Mendukung pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang)</p> <p>10. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>11. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.</p> <p>12. Mendukung penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.</p>
8	Kesinambungan Pembangunan	STE 9. Regulasi Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	<p>1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p> <p>2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>3. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.</p> <p>4. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.</p>

Sumber: Buku II SEB, Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan penjelasan pada Buku II Lampiran SEB tentang Sistematika Penulisan RPJPD Tahun 2025-2045 dan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah yang menyebutkan bahwa Arah Kebijakan Transformasi Daerah di sesuaikan dengan Arah Kebijakan Transformasi sesuai lampiran Buku II SEB Penyelarasan sebagai penerjemahan arah pembangunan wilayah dalam Bab V RPJPN Tahun 2025 – 2045, serta dapat menambahkan arah kebijakan transformasi yang di perlukan sesuai karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah.

5.1.1 Arah Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Berdasarkan Visi yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, untuk mewujudkan Sulawesi Tengah Emas 2045, telah ditetapkan 8 (delapan) Misi yang merupakan agenda pembangunan daerah, yang dikelompokkan berdasarkan Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Landasan Tranformasi, dan Kerangka Implementasi Tranformasi.

Selanjutnya, 8 (delapan) Misi agenda pembangunan daerah dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan daerah yang merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Adapun 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan Daerah RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Penyelarasan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN dengan
Arah Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2045

No	RPJPN 2025 - 2045		RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025 - 2045	
	Tranformasi	Arah Pembangunan Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1.	Sosial	IE.1 Kesehatan Untuk Semua	Sosial	STE.1 Kesehatan Untuk Semua
		IE. 2 Pendidikan Berkualitas Yang Merata		STE. 2 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

No	RPJPN 2025 - 2045		RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025 - 2045	
	Tranformasi	Arah Pembangunan Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
2.	Ekonomi	IE. 3 Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Ekonomi	STE. 3 Perlindungan Sosial Yang Adaptif
		IE. 4 Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi		STE. 4 Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi
		IE.5 Penerapan Ekonomi Hijau	Kerangka Implementasi Transformasi	STE.5 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
		IE Transformasi Digital		STE. 6 Transformasi Digital
		IE7. Integrasi ekonomi Domestik dan Global		STE. 7 Integrasi Ekonomi Domestik
3.	Tata Kelola	IE8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kerangka Implementasi Transformasi	STE. 8 Perkotaan Dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		IE 9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaftif		STE. 9 Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegrias Dan Adaptif
4.	Landasan Transformasi	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial	Landasan Transformasi	STE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Provinsi Tangguh, Dan Demokrasi Substansial
		IE 11. Stabilitas Stabilitas ekonomi makro		STE 11. Stabilitas ekonomi makro
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi Dan Berdaya Gentar Kawasan		STE. 12 Ketangguhan Diplomasi Dan Berdaya Gentar Kawasan
		IE 13. Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju		STE. 13 Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender Masyarakat dan inklusif		STE 14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		STE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE 16. Berketahanan Energi, Air dan		STE16. Berketahanan Energi, Air, Dan

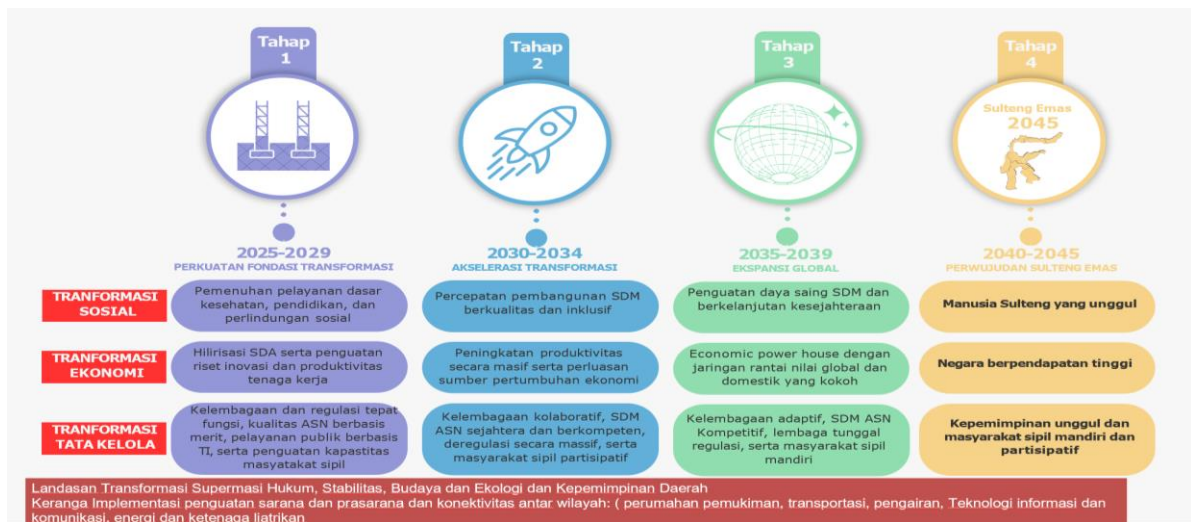
No	RPJPN 2025 - 2045		RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025 - 2045	
	Tranformasi	Arah Pembangunan Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
		Kemandirian Pangan		Kemandirian Pangan
		IE 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		STE 17. Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Sumber: Buku II SEB, Penyelarasan RPJPN dan RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan tabel penyelarasan diatas, maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 17 (tujuh belas) arah pembangunan daerah dengan sebutan **STE** (Sulawesi Tengah Emas), adalah sebagai berikut:

STE. 1	Kesehatan Untuk Semua
STE. 2	Pendidikan Berkualitas Yang Merata
STE. 3	Perlindungan Sosial Yang Adaptif
STE. 4	Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi
STE. 5	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
STE. 6	Transformasi Digital
STE. 7	Integrasi Ekonomi Domestik
STE. 8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
STE. 9	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegrias dan Adaptif
STE. 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Provinsi Tangguh, dan Demokrasi Substansial
STE. 11	Stabilitas ekonomi makro
STE. 12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan
STE. 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
STE. 14	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
STE. 15	Lingkungan Hidup Berkualitas
STE. 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
STE. 17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5.1.2 Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045



Gambar 5.1

Pentahapan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Pentahapan Pembangunan dalam jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Provinsi Sulawesi Tengah Emas 2045. Penekanan fokus atau tema pada setiap periode pentahapan RPJPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pentahapan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Penguatan Fondasi Transformasi yang merupakan tahapan pertama pembangunan daerah tahun 2025-2030, Akselerasi Transformasi yang merupakan tahapan kedua pembangunan daerah tahun 2030-2035, Ekspansi merupakan tahapan ketiga pembangunan daerah tahun 2035-2040, dan Tahapan keempat adalah Perwujudan Sulawesi Tengah Emas merupakan pembangunan daerah tahun 2040-2045.

Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya, terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan negara untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul. Di tengah perubahan dunia yang begitu pesat, Indonesia khususnya Sulawesi Tengah menghadapi berbagai tantangan domestik yang kompleks. Meskipun memiliki potensi yang besar,

pemanfaatan sumber daya dalam negeri belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Walaupun Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan yang harus dilakukan, yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia, riset dan inovasi, produktivitas sektor ekonomi produktif, ketidakpastian hukum, dan kerusakan lingkungan.

Untuk mencapai Visi Sulawesi Tengah Emas 2045, Sulawesi Tengah harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi Sulawesi Tengah adalah transformasi menyeluruh yang meliputi: Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola dan juga ditopang oleh landasan transformasi serta kerangka implementasi transformasi.

Transformasi ini adalah kunci penting pembangunan jangka panjang, di mana di antara ketiganya saling terkait dan saling memengaruhi di dalam mewujudkan Indonesia Emas dan Sulawesi Tengah Emas 2045. Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dilaksanakan **transformasi sosial** yang memastikan manusia sebagai tujuan pembangunan dapat menjadi manusia Sulawesi Tengah yang unggul sekaligus berperan dalam melaksanakan ketiga transformasi tersebut. Adapun **transformasi ekonomi** merupakan titik penting untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan produktivitas perekonomian secara keseluruhan agar Sulawesi Tengah dapat keluar dari jebakan daerah yang bergantung pada anggaran dari pusat, menjadi daerah maju. Sementara itu, **transformasi tata kelola** akan menjamin terlaksananya transformasi sosial dan transformasi ekonomi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Transformasi tata Kelola akan menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Sebagai contoh, peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat menyebabkan perubahan dalam nilai dan perilaku sosial seperti kapasitas pendidikan dan status kesehatan. Sebaliknya, transformasi sosial yang antara lain

ditunjukkan oleh peningkatan kualitas SDM, akan mendorong keberhasilan transformasi ekonomi melalui industrialisasi dan Sumber Daya Alam. Selanjutnya, industri dan Sumber Daya Alam akan mengubah norma-norma sosial serta struktur dan fungsi pemerintahan. Transformasi tata kelola juga dapat mengubah cara pemerintah daerah berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Landasan stabilitas daerah yang kuat dan ketangguhan daerah sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan. Semua transformasi dapat berjalan baik.

Selanjutnya **ketahanan keamanan daerah yang tangguh, khususnya ketahanan sosial budaya dan ekologi**, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi diperlukan, dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang bersumber dari kekayaan alam dan lingkungan hidup. Sebaliknya, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Pentahapan Pembangunan Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

VISI	MISI	TAHAPAN PERIODE ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 PENGUATAN FONDASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI	2040-2045 PERWUJUDAN SULAWESI TENGAH EMAS
	(1) Transformasi Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan dan perlindungan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan dan perlindungan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Daya Saing Bidang Pendidikan 	Perwujudan SDM Pendidikan yang berkualitas dan merata yang menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya sainG
		<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan dan pemerataan Fasilitas Kesehatan yang 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan peningkatan Fasilitas Kesehatan yang memadai dan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Daya Saing Bidang Kesehatan 	Perwujudan system Kesehatan yang Tangguh dan responsif.

VISI	MISI	TAHAPAN PERIODE ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 PENGUATAN FONDASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI	2040-2045 PERWUJUDAN SULAWESI TENGAH EMAS
SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH PERTANIAN DAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN		memadai dan memenuhi standar di barengi Jumlah dan Kualitas SDM kesehatan. • Pemenuhan Upaya Kesehatan dan penguatan sistem Kesehatan daerah. • Pemenuhan Jaminan Kesehatan nasional	memenuhi standar di barengi Jumlah dan Kualitas SDM kesehatan. • Peningkatan Upaya Kesehatan dan penguatan sistem Kesehatan daerah. • Peningkatan Jaminan Kesehatan nasional		
		• Pengurangan kemiskinan serta Pemenuhan perlindungan sosial yang berkeadilan inklusif dan adaptif.	• Percepatan Pengurangan kemiskinan serta Pemenuhan perlindungan sosial yang berkeadilan inklusif dan adaptif.	• Penuntasan kemiskinan serta Pemenuhan perlindungan sosial yang berkeadilan inklusif dan adaptif.	• Penuntasan kemiskinan serta Pemenuhan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat
	(2) Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Sulteng sebagai penunjang superhub ekonomi IKN dan Industri berbasis SDA melalui: • Hilirisasi dan produktivitas Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja serta didukung transformasi digital.	Sulteng sebagai penunjang superhub ekonomi IKN dan Industri berbasis SDA melalui: • Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi • Penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. • Percepatan Penguatan ekonomi dan keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal melalui penguatan ekosistem industri dan penguatan rantai nilai industri, penguatan kewirausahaan dan	Sulteng sebagai penunjang superhub ekonomi IKN dan Industri berbasis SDA melalui: • Terintergrasinya secara domestik dan terhubung secara internasional, pusat-pusat pertumbuhan sektor ekonomi baru. • Penguatan ekonomi dan keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal melalui penguatan ekosistem industri dan penguatan rantai nilai industri, penguatan kewirausahaan dan UMKM	Sulteng sebagai penunjang superhub ekonomi IKN dan Industri berbasis SDA melalui: • Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing global.

VISI	MISI	TAHAPAN PERIODE ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 PENGUATAN FONDASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI	2040-2045 PERWUJUDAN SULAWESI TENGAH EMAS
			UMKM		
	(3) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan SDM ASN Berkualitas • Penerapan <i>system merit</i> dalam manajemen ASN dan Penguatan manajemen talenta ASN • Peningkatan layanan publik terpadu (fisik dan non fisik yang berkualitas dan inklusif berbasis digital. • Penerapan pemerintahan yang berbasis digital dan inovatif untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien. • Penguatan impelementasi SPIP diseluruh Perangkat Daerah dan Peningkatan Integritas ASN. • Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kemandirian fiskal berbasis elektronik. • Penataan kelembagaan daerah menuju organisasi pemerintahan yang modern, adaptif dan profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan SDM ASN Berkualitas yang didukung oleh transformasi digital • Penguatan <i>system merit</i> dalam manajemen ASN dan Penguatan manajemen talenta ASN • Percepatan layanan publik terpadu (fisik dan non fisik yang berkualitas dan inklusif berbasis digital. • Percepatan Penerapan pemerintahan yang berbasis digital dan inovatif untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien. • Percepatan impelementasi SPIP diseluruh Perangkat Daerah dan Peningkatan Integritas ASN. • Percepatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kemandirian fiskal berbasis elektronik. • Percepatan Penataan kelembagaan daerah menuju organisasi pemerintahan yang modern, adaptif dan profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM ASN Kompetitif • Penguatan <i>system merit</i> dalam manajemen ASN dan Penguatan manajemen talenta ASN. • Penguatan layanan publik terpadu (fisik dan non fisik yang berkualitas dan inklusif berbasis digital. • Penguatan pemerintahan yang berbasis digital dan inovatif untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien. • Penguatan impelementasi SPIP diseluruh Perangkat Daerah dan Peningkatan Integritas ASN. • Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kemandirian fiskal berbasis elektronik. • Penguatan Penataan kelembagaan daerah menuju organisasi pemerintahan yang modern, adaptif dan profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi dan Tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
	(4) Keamanan daerah Tangguh,	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Integritas partai politik dan pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Partai politik berintegritas dan masyarakat sipil partisipatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Partai politik modern, dan masyarakat sipil mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kebebasan sipil/ruang sipil, untuk semua pihak serta

VISI	MISI	TAHAPAN PERIODE ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 PENGUATAN FONDASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI	2040-2045 PERWUJUDAN SULAWESI TENGAH EMAS
	demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	<p>masyarakat sipil.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Masyarakat sipil untuk terwujudnya Open Government Partnership. Kesinambungan Fiskal dan stabilitas harga 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kebebasan sipil/Ruang sipil, Partisipasi untuk semua pihak Kesinambungan fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kebebasan sipil/Ruang sipil, Partisipasi untuk semua pihak. Kemandirian fiskal 	Kemandirian fiskal dan stabilitas harga.
	(5) Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	<p>Memperkuat Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi sebagai modal dasar pembangunan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan peran agama sebagai landasan spritual, etika, dan moral. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter. Peningkatan ketangguhan individu dan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif/kelompok rentan. Pengendalian kualitas air, tanah, dan udara serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menunggu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan 	<p>Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi sebagai modal dasar pembangunan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan peran agama sebagai landasan spritual, etika, dan moral. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter. Peningkatan ketangguhan individu dan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif/kelompok rentan. Pengendalian kualitas air, tanah, dan udara serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menunggu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk 	<p>Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi sebagai modal dasar pembangunan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan peran agama sebagai landasan spritual, etika, dan moral. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter. Peningkatan ketangguhan individu dan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif/kelompok rentan. Pengendalian kualitas air, tanah, dan udara serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menunggu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengendalian kawasan pertanian pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang Hijau, Ekologis dan Produktif.

VISI	MISI	TAHAPAN PERIODE ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 PENGUATAN FONDASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI	2040-2045 PERWUJUDAN SULAWESI TENGAH EMAS
		<p>untuk mewujudkan kemandirian pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon. 	<p>mewujudkan kemandirian pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon. 	<p>berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon. 	
	(6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah. • Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah. • Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah. • Pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkoneksinya antar wilayah satu dengan wilayah lain yang mengurangi kesenjangan wilayah.
	(7) Mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar • Peningkatan sarana dan prasarana dan utilitas umum serta rumah layak huni yang terjangkau dan pengentasan kawasan kumuh. • Peningkatan layanan air siap minum dan sanitasi aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan infrastruktur pelayanan dasar • Percepatan sarana dan prasarana dan utilitas umum serta rumah layak huni yang terjangkau dan pengentasan kawasan kumuh. • Percepatan layanan air siap minum dan sanitasi aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar • Percepatan Peningkatan sarana dan prasarana dan utilitas umum serta rumah layak huni yang terjangkau dan pengentasan kawasan kumuh. • Percepatan layanan air siap minum dan sanitasi aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan sarana dan prasarana dasar Sulawesi Tengah yang berkualitas dan ramah lingkungan.

VISI	MISI	TAHAPAN PERIODE ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 PENGUATAN FONDASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI	2040-2045 PERWUJUDAN SULAWESI TENGAH EMAS
	(8) Kekinambungan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan inovasi pembiayaan daerah untuk percepatan dan kesinambungan pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan inovasi pembiayaan daerah untuk percepatan dan kesinambungan pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan inovasi pembiayaan daerah untuk percepatan dan kesinambungan pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan inovasi pembiayaan daerah untuk percepatan dan kesinambungan pembangunan

A. Transformasi Sosial

Untuk dua puluh tahun ke depan akan terjadi beberapa perubahan sehingga memerlukan transformasi sosial. Perubahan tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergolakan geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Transformasi Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih Sejahtera dan adil. Tercapainya transformasi sosial tersebut bertumpu kepada upaya pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia. Karena itu, transformasi sosial di arahkan untuk:

- mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk;
- mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan;
- mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang;
- membentuk sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
- membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status;
- melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil, politik, dan ekonomi, sosial, dan budaya;

- g. mempromosikan pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang;
- h. meningkatkan peran masyarakat, agama dan kebudayaan sebagai penggerak pembangunan; dan
- i. mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif sehingga pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan Provinsi Sulawesi Tengah dengan transformasi sosial akan menghadapi perubahan besar.

Sebagai bentuk dukungan akan tercapainya visi Indonesia Emas 2045, transformasi sosial ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui kebijakan yang di arahkan pada terwujudnya:

- a. kesehatan untuk semua
- b. pendidikan berkualitas yang merata
- c. perlindungan sosial yang adaptif.

1. Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk, Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah Pusat dan Daerah, organisasi non Pemerintahan, pelaku usaha, maupun masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan dan lingkungan. Kebijakan pembangunan kesehatan di arahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan. Kebijakan untuk meningkatkan upaya kesehatan, di tekankan pada :

- a. peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif dan preventif, antara lain mencakup deteksi dini, vaksinasi terutama imunisasi rutin lengkap, penemuan kasus dan pengobatan secara masif, peningkatan literasi kesehatan, dan pembudayaan perilaku hidup sehat, penyehatan lingkungan didukung oleh tata kota, lingkungan, serta sarana dan prasarana

- termasuk konektivitas transportasi, ruang terbuka, fasilitas aktivitas fisik dan olahraga, akses air minum, dan sanitasi aman, serta permukiman sehat;
- b. pengendalian produksi, konsumsi, dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan;
 - c. penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, percepatan penuntasan permasalahan stunting, dan kelebihan gizi melalui peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, pengayaan zat gizi, dan jaminan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan;
 - d. penguatan pelayanan kesehatan, ibu, anak, dan lanjut usia, kesehatan mental, kesehatan kerja, Kesehatan tradisional, pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular terutama tuberculosis dan schistosomiasis, serta penuntasan penyakit tropis terabaikan seperti kusta;
 - e. pengembangan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sistem kesehatan, serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah;
 - f. perluasan investasi pelayanan kesehatan primer (*primary health care*) yang komprehensif termasuk kelembagaan kader kesehatan yang didukung komitmen politik, kepemimpinan, pembiayaan dan tata kelola, kolaborasi intersektoral, pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat termasuk swasta;
 - g. pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dengan inovasi pelayanan kesehatan sesuai kondisi wilayah termasuk gugus pulau dan pegunungan;
 - h. pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
 - i. pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan dengan fokus pada penerapan belanja strategis untuk mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan.

Kebijakan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif, difokuskan pada:

- a. penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi, dan respon terutama untuk kedaruratan Kesehatan pasca bencana dan kejadian luar biasa serta dampak perubahan iklim.
- b. pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah; percepatan produksi dokter spesialis dan dokter subspesialis dengan Rumah Sakit (RS) sebagai penyelenggara utama pendidikan; peningkatan kapasitas, kualitas, dan relevansi lembaga pendidikan dengan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- c. peningkatan secara signifikan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan bersumber pemerintah (terutama untuk upaya kesehatan masyarakat), non pemerintah, pembiayaan asuransi, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian pembiayaan rumah sakit pemerintah;
- d. penetapan sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah termasuk tujuan dan subsistem didalamnya, peningkatan tata kelola pembangunan kesehatan dan penguatan kepemimpinan, peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan di daerah; dan
- e. percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular seperti malaria dan schistosomiasis melalui pendekatan integrasi multi sektor dan rekayasa lingkungan habitat vector.

Tabel 5.4
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas (STE) 1

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
	STE 1: KESEHATAN UNTUK SEMUA	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,64	78,30
		2. Kesehatan Ibu dan Anak		
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	176	22

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
		b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,9	6,7
		3. Penanganan Tuberkulosis dan Eliminasi Schistosomiasis		
		a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	71	95
		b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	89,14	98,00
		c. Prevelensi Schistosomiasis	<1	<1
		4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99.5	99.5

2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup Manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Taraf pendidikan penduduk yang meningkat mampu menciptakan SDM unggul dan berdaya saing. Dalam menciptakan SDM unggul maka Pendidikan sangat berperan penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga tercipta kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, kebijakan pendidikan di arahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*life long learning*), mencakup:

- a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan pembelajaran berbasis digital, pemerataan akses Pendidikan dengan penerapan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun meliputi Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang inklusif dan Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja melalui penguatan keahlian dan kompetensi baru,

pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan kerja sama penelitian dan pengembangan strategis; penguatan keselarasan bidang keahlian/program studi sesuai kebutuhan DUDI, keterampilan abad 21, serta penguasaan dan pengembangan sains dan teknologi termasuk untuk menghasilkan *innovation-based start up*; penguatan sistem pembelajaran berstandar industri; peningkatan kapasitas pendidik/ instruktur/ pelatih; peningkatan program sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, dan peningkatan kualitas pembinaan talenta olahraga serta peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyelarasan pemanfaatan anggaran pendidikan pada tingkat pusat dan daerah; pemanfaatan sumber pendanaan inovatif; dan penerapan strategi pendanaan pendidikan yang berkeadilan.

Tabel 5.5
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 2

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
	STE 2: PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA	5. Hasil Pembelajaran:		
		a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
		- Literasi Membaca	7,69 - 7,69	69,23 - 69,23
		- Numerasi	0,00 - 7,69	61,54 - 61,54
		b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
		- Literasi Membaca		
		- Numerasi		

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
		c. Harapan lama sekolah	13,59 – 13,60	15,01 – 15,09
		d. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,55 - 9,56	12,10 - 12,16
		e. Angka Melek Huruf penduduk Usia diatas 15 Tahun (%)	99,28	100
		f. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA Sederajat (%)	75	100
		6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas Pendidikan tinggi (%)	12,57	12,57 – 14,67
		7. Persentase pekerja lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Bekerja di Bidang Keahlian (%)	76,43	90,00

3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Kebijakan ini di laksanakan melalui:

- penuntasan kemiskinan dengan satu sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
- pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim;
- integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat;
- peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;

- e. peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha;
- f. peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan care economy, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan;
- g. inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan utamanya pengembangan *social impact bonds*, *social impact investment*; serta
- h. penguatan tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan target penerima manfaat, termasuk data Regsosek.
- i. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
- j. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.

Tabel 5.6
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 3

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
3	STE Perlindungan sosial yang adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	11,06-11,56	0,30-0,80
		9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	30,33 – 33,86	80,96
		10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	50

B. Transformasi Ekonomi

Transformasi pembangunan ekonomi diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan nilai serta meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi secara berkelanjutan yang difokuskan pada industri pertambangan, industri galangan kapal, Kawasan wisata, Kawasan perikanan tangkap dan budidaya industri pengolahan, Kawasan pertanian dan Perkebunan seperti kelapa dan kopi.

Pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar Dimana Provinsi Sulawesi Tengah menuntut dilakukannya transformasi ekonomi. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, dan geoekonomi. Di samping itu, transformasi ekonomi juga merupakan kunci untuk mewujudkan Sulawesi Tengah ke luar dari jebakan daerah berpendapatan menengah (*Middle Income Trap* atau *MIT*). Perekonomian juga akan lebih diarahkan untuk berorientasi ekspor nilai tambah tinggi. Pelaksanaan transformasi ekonomi akan membuat negara dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan perekonomian menjadi lebih efisien dan produktif, sehingga memperkuat sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk tumbuh dan berkembang.

Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi Sulawesi Tengah dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri berbasis sumber daya alam dan pertanian, penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan teknologi informasi, investasi yang besar dalam riset dan inovasi, serta didukung pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi tidak bisa terjadi dengan cepat dan mudah, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi dan inklusif. Di sisi pemerintah, perlu adanya komitmen dan kebijakan yang tepat untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi Sulawesi Tengah dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri manufaktur dan pertanian,

penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan teknologi informasi, investasi yang besar dalam riset dan inovasi, serta didukung pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi tidak bisa terjadi dengan cepat dan mudah, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan Lembaga pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi dan inklusif bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders) bukan hanya untuk pemegang saham (shareholders). Di sisi pemerintah, perlu adanya komitmen dan kebijakan yang tepat untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berlandaskan berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi, secara singkat kerangka pikir untuk merumuskan transformasi ekonomi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut: Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas. Perekonomian akan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (value creation), serta mengubah ekonomi berbasis buruh murah dan keterampilan rendah (prespiration) menjadi mengandalkan pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi (aspiration). Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan penguatan industrialisasi, modernisasi, dan digitalisasi pertanian dan jasa, peningkatan produktivitas BUMD, UMKM dan Koperasi, serta tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional.

Selain itu, ekonomi biru dan bioekonomi akan menjadi penguat perekonomian masa depan, seiring dengan peranannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penciptaan nilai tambah ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sangat penting dalam menciptakan teknologi dan metode baru yang efisien, terutama bagi penciptaan produk-produk baru dan peningkatan produktivitas perekonomian. Untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi lintas generasi, diterapkan konsep ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tengah dalam jangka

panjang. Proses dekarbonisasi juga berfungsi ganda sebagai penjaga kelestarian lingkungan sekaligus sebagai sumber pertumbuhan investasi serta kesempatan kerja hijau yang layak. Untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi lintas generasi, diterapkan konsep ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam jangka panjang. Proses dekarbonisasi juga berfungsi ganda sebagai penjaga kelestarian lingkungan sekaligus sebagai sumber pertumbuhan investasi serta kesempatan kerja hijau yang layak. Sementara itu, transformasi digital harus dipercepat di seluruh wilayah Indonesia secara merata dan diarusutamakan dalam berbagai sektor ekonomi yang disertai dengan penguatan talenta digital. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses terhadap layanan digital berkualitas, memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi dampak negatif disrupsi teknologi digital seperti kesenjangan digital (*digital divide*) dan peningkatan pengangguran akibat hilangnya sejumlah pekerjaan. Ekonomi Sulawesi Tengah harus terintegrasi secara domestik dan terhubung secara global. Hal tersebut dicapai melalui penyebaran pembangunan ekonomi dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM serta pengembangan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi. Selain itu, dukungan infrastruktur konektivitas yang baik akan mewujudkan konektivitas antarwilayah, memperkuat akses ke pasar regional dan global, serta mengurangi biaya logistik. Selanjutnya, pembangunan perkotaan termasuk Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan, harus menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern. IKN mendorong pembangunan Sulawesi Tengah Sentris dan menjadi contoh kota berwawasan lingkungan, aman, nyaman, dan hijau serta perlu mengadopsi konsep *smart city*, di mana layanan digital mendominasi kehidupan sosial dan ekonomi.

4. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Sulawesi Tengah diharapkan akan mengambil peran sebagai salah satu pusat pengembangan IPTEK dan Inovasi di Kawasan Timur Indonesia. IPTEK dan inovasi menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga

mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

Industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing global, sehingga arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah :

1. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral seperti nikel dan biji logam, serta peningkatan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.
2. Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor pertanian, perkebunan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pariwisata).
3. Pelaksanaan afirmasi *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan.
4. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.
5. Pelaksanaan afirmasi *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.
6. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
7. Peningkatan pengembangan IPTEKIN menuju komersialisasi oleh industri;
8. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.

Tabel 5.7
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 4

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
4.	STE: IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97 – 41,45	49,17 – 52,70
		12. Pengembangan Pariwisata:		
		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,32 – 0,45	0,76
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	4,07-8,38	10,18
		13. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
		a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level provinsi (%)	13,10	17,17
		b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	1,31	3,25

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
		c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,82	6,19
		d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,65	3,37
		e. <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	2,26	5,48
		14.Penciptaan Lapangan Kerja Yang Baik		
		a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,25 - 2,94	1,56 - 2,57
		b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	70
		15.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,30	69,5
		16.Tingkat Penguasaan Iptek: Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif

5. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon yang meliputi:

- a. peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan;
- b. transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil;
- c. pengembangan smart grid termasuk jaringan interkoneksi dalam dan antar pulau serta sistem terisolasi (*isolated grid*);
- d. pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (*battery/energy storage system*);
- e. pengembangan transportasi ramah lingkungan;
- f. penerapan ekonomi sirkular;
- g. pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan;
- h. penguatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan green financing dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi hijau, serta
- i. penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor;
- j. membangun komunitas yang berkelanjutan yang memungkinkan setiap anggotanya mengurangi dampak pada lingkungan.

Transisi energi diarahkan untuk pemanfaatan energi bersih, efisien, dan terbarukan melalui percepatan penggunaan energi terbarukan secara bertahap, pengembangan infrastruktur dan teknologi, peningkatan konsumsi energi berkualitas, penuntasan listrik pedesaan, pengembangan jaringan kelistrikan, dan percepatan pemanfaatan kendaraan transportasi yang menggunakan energi

bersih yang didukung dengan penggunaan sistem penyimpanan energi secara massal di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Percepatan implementasi ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi penggunaan materi input produksi (*resource efficiency*) yang berasal dari sumber daya alam sekaligus mewujudkan Sulawesi Tengah zero waste melalui penerapan 9R (*Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover*). Pengembangan ekosistem ekonomi sirkular akan difokuskan pada 5 (lima) industri prioritas:

- a. makanan dan minuman;
- b. elektronik,
- c. tekstil,
- d. konstruksi dan bahan bangunan,
- e. packaging termasuk plastik.

Prinsip menuju zero waste diterapkan dengan pelaksanaan pilah-kumpul-olah-manfaatkan sistem pengelolaan sampah/limbah domestik dan industri, disertai dengan upaya Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah domestik, dan penyediaan fasilitas pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi industri. Pengelolaan hutan produksi dan pertanian secara berkelanjutan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung hilirisasi produk-produk hutan dan pertanian (pangan, ternak, dan perkebunan) di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Pendekatan agroforestri melibatkan masyarakat lokal menjadi prioritas sehingga terjadi pengelolaan bentang alam (*landscape*) secara terpadu dan terintegrasi antara kawasan hutan dan lahan pertanian. Melalui arah kebijakan ini, perbaikan unsur hara tanah dapat ditingkatkan, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dapat dikurangi, nilai tambah ekonomi dapat ditingkatkan.

Pembiayaan untuk mendukung Ekonomi Hijau diarahkan untuk mempercepat terwujudnya investasi hijau di berbagai sektor. Percepatan investasi hijau akan didukung dengan pembentukan mekanisme insentif dan disinsentif yang berkeadilan, pengembangan berbagai sistem pembiayaan hijau inovatif yang memenuhi kaidah *Environment, Social, Governance* (ESG), serta pelaksanaan

carbon pricing (*carbon trading*, *carbon offset*, dan *pajak karbon*) di berbagai bidang.

Tabel 5.8
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 5

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
5	STE 5. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	17. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
		a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	66,16	78,11
		b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	30,51	78,54

6. Transformasi Digital

Untuk mewujudkan Sulawesi Tengah Emas 2045 utamanya melalui transformasi ekonomi memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Transformasi digital tersebut mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan yaitu terkait:

- regulasi dan institusi;
- pembangunan sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk pendidikan dan pelatihan;
- infrastruktur digital dan teknologi,
- keterpaduan data (data enablement);
- modal investasi teknologi (financing technologies); serta
- riset dan inovasi. Sinergitas enam prasyarat tersebut perlu diciptakan sebagai tolak ukur terbangunnya ekosistem digital tangguh dan berdaulat pada tahun 2045. Penyelenggaraan konsep dasar membangun ekosistem transformasi digital adaptif di atas diperoleh dengan membangun sistem kesatuan teknologi dan digital Indonesia melalui Super Platform Digital Indonesia. Arah kebijakan transformasi digital mencakup:

- i. Pembentukan regulasi dan institusi dalam tingkat yang tinggi (dalam bentuk Peraturan Daerah) akan menjadi dasar dan kepastian dalam pengembangan transformasi digital, yang mencakup antara lain aspek kelembagaan, infrastruktur, SDM, pemanfaatan, serta riset dan inovasi digital;
- ii. Pengembangan sisi suplai mencakup pengembangan infrastruktur digital secara merata dan berkualitas untuk mencapai 100 persen akses digital berkualitas di seluruh Sulawesi Tengah seperti peningkatan kualitas layanan yang inklusif termasuk melalui pemanfaatan satelit, didukung peningkatan kecepatan akses serta subsidi infrastruktur digital; serta percepatan penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas untuk menguasai teknologi disruptif melalui peningkatan kualitas SDM digital yang adaptif dan berdaya saing global, termasuk dengan penyusunan kurikulum dan penyediaan guru beserta sarana dan prasarana terkait digital yang memadai;
- iii. Pengembangan sisi permintaan meliputi percepatan digitalisasi sektor utamanya melalui dorongan dan dukungan insentif dan subsidi untuk terjadinya digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri dan *e-commerce*; penguatan pemerintah digital melalui penyiapan infrastruktur pendukung dan SDM SPBE yang dibutuhkan serta pembangunan smart city di berbagai kota dan digitalisasi perdesaan (*smart village*) secara bertahap; digitalisasi sistem pembayaran yang inklusif; peningkatan peran UMKM dalam *e-commerce* domestik dan global; percepatan literasi digital masyarakat; serta penciptaan ruang digital yang merata dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan (*online safety*).
- iv. Penguasaan teknologi digital berbasis riset dan inovasi digital terutama melalui afirmasi fokus dan peningkatan alokasi sumber daya untuk riset dan inovasi digital;
- v. Pengembangan sistem pembiayaan dan insentif yang mendukung transformasi digital mencakup pembiayaan suku bunga rendah;

insentif pajak untuk investasi di teknologi digital; kemitraan dengan lembaga keuangan; serta insentif dalam pendanaan dan investasi di infrastruktur digital, terutama di daerah afirmasi 3TP;

- vi. Pengembangan keterpaduan data (data enablement) antara lain melalui pengembangan berbagai pusat data nasional baik pemerintah dan swasta, serta penguatan Satu Data Indonesia (SDI);
- vii. Pengembangan industri digital untuk penguatan sisi suplai transformasi digital dan mengurangi kebergantungan terhadap impor. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk : (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit Listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; (ix) dukungan pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.

Tabel 5.9
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 6

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045

6	STE. Transformasi Digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,3
---	---------------------------	---	-----	-----

7. Integrasi Ekonomi Domestik

Integrasi ekonomi akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Kekuatan besar Indonesia memainkan peran kunci sebagai economic powerhouse yang terlibat aktif dan berperan besar dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Kebijakan terkait integrasi ekonomi dan konektivitas difokuskan pada:

- a. penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi;
- b. penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata daerah dan Nasional (KSPDN), sesuai dengan potensi wilayah untuk menciptakan keunggulan kompetitif;
- c. penguatan logistik nasional utamanya melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menuju logistik 4.0, peningkatan kualitas SDM logistik, penciptaan ekosistem logistik yang efisien, serta penguatan kelembagaan logistik;
- d. penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi;
- e. peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global;
- f. peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi.

- g. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
- h. Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah.

Tabel 5.10
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 7

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
7	STE. 7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi	7,36	4,81
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	42,4	34,44
		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	77	91,13

8. Wilayah Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan berbagai pembangunan sesuai Visi Sulawesi Tengah Emas 2045 diperlukan investasi yang tinggi dan berkualitas dimulai dari Kawasan perkotaan dan perdesaan. Kebijakan investasi ke depan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang diarahkan pada :

- a. Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif;
- b. Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
- c. investasi yang diprioritaskan untuk mengembangkan industri prioritas, mendukung transformasi digital, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata;
- d. investasi berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi.

Tabel 5.11
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 8

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
8	STE. 8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
		a. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,93	3,05
		b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	66,32	100
		c. Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	0,27	9,66

C. Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, **terdapat 11 (sebelas) isu strategis** dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu:

- 1) Regulasi
- 2) kelembagaan yang efektif,
- 3) proses bisnis yang adaptif,
- 4) manajemen talenta,
- 5) meritokrasi dan integritas,
- 6) manajemen ASN Strategis,
- 7) pelayanan publik yang berkualitas,
- 8) pelayanan bidang strategis,

- 9) digitalisasi,
- 10) integritas partai politik, dan
- 11) relasi pemerintah dan masyarakat sipil.

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. melalui mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* yang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif.

9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif

Transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Dalam mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas, arah kebijakan difokuskan pada:

1. Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi, serta penguatan kajian urgensi regulasi dengan menggunakan metode analisis dalam pembentukan regulasi, dan peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi melalui pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, penataan proses bisnis regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu dalam setiap proses pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan regulasi, serta pembentukan basis data tunggal sebagai referensi utama statistik regulasi.
2. Pemetaan proses bisnis tematik berdasarkan isu prioritas dan pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan *shared outcomes*. Dalam mewujudkan manajemen talenta, arah kebijakan difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN di seluruh perangkat daerah melalui pembangunan *talent pool* dengan pembangunan sistem informasi manajemen talenta dan satu data manajemen talenta, penuntasan

asesmen kompetensi, penguatan manajemen kinerja dan pengembangan kompetensi ASN, serta perbaikan kebijakan penghargaan bagi ASN.

j.

1. Mewujudkan manajemen ASN untuk mendukung sektor/bidang strategis difokuskan pada penataan manajemen ASN sektor pelayanan dasar melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru serta tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pelayanan.
2. Mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu (fisik dan non fisik) melalui pengembangan portal dan/atau platform pelayanan publik Sulawesi Tengah.
3. Mewujudkan transformasi digital pemerintahan, arah kebijakan difokuskan pada transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data nasional, percepatan penerapan satu data Indonesiadan percepatan kesiapan digital (*digital readiness*) melalui penguatan talenta digital ASN, peningkatan literasi digital masyarakat, percepatan pembentukan regulasi yang adaptif, dan pembentukan lembaga publik pelaksana percepatan transformasi digital pemerintahan
4. Mendukung peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital

Tabel 5.12
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 9

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
9	STE.9 Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	65-70	100
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,35 “Baik”	5,00
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,48	5,00

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
		a. Indeks Reformasi Birokrasi	65	120
		27. Indeks Nasional Integritas (Survey Penilaian Integritas (SPI))	70,58	85,02

D. Landasan Transformasi

➤ Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Provinsi Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Sulawesi Tengah 2045, perlu didukung oleh penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi, serta Ekonomi makro sebagai faktor penentu. Untuk mendukung Visi Sulawesi Tengah Emas 2045, arah kebijakan pembangunan meliputi:

- Hukum Berkeadilan, Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial,
- Stabilitas Ekonomi Makro, serta
- Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

Pembangunan Demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Demokrasi substansial akan dilaksanakan melalui arah kebijakan berikut:

- Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat;
- Pengarusutamaan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- Penguatan dan pencegahan pemanfaatan politik identitas;
- Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; serta
- Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, di antaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil untuk memperkuat

keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Tabel 5.13
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 10

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
10	STE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Provinsi Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Indeks Kualitas Kebijakan a. <i>Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah</i> b. <i>persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM</i>	70 60	100 80
		29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	53,25	70,63
		30. Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi

11. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-pertumbuhan dan pro- pemerataan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan transformasi stabilitas ekonomi makro, optimalisasi bauran kebijakan bank sentral dan penguatan sektor keuangan, yang didukung dengan penguatan koordinasi dan sinergi para pemangku kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan sektor keuangan. Transformasi perencanaan dan kebijakan fiskal dilakukan melalui:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko
- b. Penerapan aturan fiskal (*fiscal rules*) adaptif;
- c. Reformasi sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD; dan
- d. Transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.

Upaya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Pembangunan dan kebijakan pendapatan daerah akan berfokus pada Akselerasi reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif, Peningkatan basis pajak melalui penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong sektor informal untuk menjadi sektor formal.

Tabel 5.14
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 11

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
11	STE: 11 Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,57	0,30
		32. Tingkat Inflasi (%)	3,6 – 4,6	1,2 - 3,8
		33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	12,85	60,5
		b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,03	0,88
		c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	3.094.537,51	28.533.530,53
		d) Total Kredit/PDRB	14.17	57,4

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
		(%)		
		34. Inklusi keuangan (%)	85,05	97,49

12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan saling berkaitan erat dan memperkuat, yang antara lain bertujuan untuk melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memperjuangkan kepentingan daerah di berbagai bidang. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

- Peningkatan pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Peningkatan prestasi, inovasi dan penghargaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan;
- Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan daerah dalam kondisi dinamik yang terintegrasi dengan kondisi geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
- Pemantapan tata kelola kebijakan daerah guna merespon dinamika geopolitik dan geoekonomi, serta disrupsi teknologi digital dan perubahan iklim;
- Pemajuan nilai dan budaya, guna peningkatan citra Sulawesi Tengah di mata Nasional.

Tabel 5.15
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 12

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
----	------------------	-----------	-----------	--------

			2025	2045
12	STE. 12 Ketangguhan Diplomasi Dan Berdaya Gentar Kawasan	35. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	60 - 79	90 - 100
		36. Indeks Daya Saing Daerah	3,43	5

➤ **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

Jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat mengakibatkan eksploitasi dan kerusakan lingkungan terus terjadi, sementara daya pulih alam tidak secepat peningkatan kebutuhan tersebut. Perubahan iklim dan bencana juga berdampak nyata, membawa kerugian tidak hanya ekonomi, tetapi juga penghidupan, tempat tinggal, bahkan nyawa. Di sisi lain, akibat globalisasi terjadi pelemahan nilai-nilai positif pada sebagian kelompok masyarakat seperti kejujuran, empati, kesukarelawanan, dan toleransi, serta perubahan pola interaksi yang semakin individualis. Hal ini mengakibatkan timbulnya degradasi moral, konflik, rasa tidak aman, kerentanan yang mengancam harmoni dan keberfungsian sosial dalam keluarga juga masyarakat, serta kerusakan lingkungan dan alam sekitar.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahap dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam Pembangunan. Hubungan timbal balik antara sistem sosial budaya dan ekologi selalu mencari keseimbangan dan membentuk ketahanan sosial budaya dan ekologi. Manusia dan lingkungan pada hakikatnya hidup di dalam suatu ekosistem agar saling menguntungkan dan menjaga keberlangsungan bersama.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi bertumpu pada keseimbangan antara kemampuan sumber daya alam dan lingkungan.

Hal ini diperlukan untuk beradaptasi, pulih, dan terus berfungsi dalam menyediakan jasa lingkungan, membangun kemampuan manusia, masyarakat yang beretika, bermoral, dan berbudaya, dan keluarga yang berkualitas, dalam mengelola sumber daya dan lingkungannya. Hal tersebut juga diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan kerusakan alam sehingga generasi mendatang dapat menikmati hasil pembangunan dan merasakan kualitas hidup yang baik.

Sebagai landasan terwujudnya Sulawesi Tengah Emas 2045, ketahanan sosial budaya dan ekologi dapat tercapai melalui kebijakan yang diarahkan pada terwujudnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju, (ii) keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, (iii) lingkungan hidup berkualitas, (iv) berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta (v) resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan, melalui:

- a. Peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Pembangunan kehidupan beragama yang filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata; dan
- d. Jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.
- e. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.

Tabel 5.16
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 13

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
13	STE. 13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	52,52 - 52,59	60,99 - 61,62
		38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,7 - 77,74	85,16 - 85,61

14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan:

- peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga;
- pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan;
- pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan
- penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristi dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia.

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*), dengan arah kebijakan :

- a. penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif;
- b. penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif;
- c. penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan pengetahuan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengembangan mekanisme insentif, dan pelibatan *vibrant community*;
- d. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local;
- e. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
- f. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan
- g. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

Tabel 5.17
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 14

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
14	STE. 14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,33	71,07 - 71,1
		a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60	70 – 80

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
		(skala 0-100)		
		b. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per wanita)	2,12	2,2
		c. Angka Prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) (%)	65	100
		d. Persentase kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)	14	5
		e. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age Spesific Fertility Rate/ASFR) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun)	30/1000	5/1000
		40.Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,446-0,444	0,212-0,196

15. Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau. Pencemaran air, udara dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas Pembangunan yang tidak berkelanjutan (*brown economy*). Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan

Perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

Tata Kelola yang baik menjadi kunci dalam memastikan ekosistem serta kelestarian keanekaragaman hayati agar memberikan manfaat social dan ekonomi kepada generasi sekarang dan selanjutnya. Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan Sulawesi Tengah. Kekayaan keanekaragaman hayati di darat dan di laut dikelola untuk mendukung ekonomi berbasis hayati (bio ekonomi) baik berupa produk dan jasa. penerapan prinsip inklusif dan berkelanjutan yang menjunjung asas kesetaraan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk melindungi dan menghormati kearifan lokal dan kedaulatan daerah, dengan arah kebijakan:

1. Perubahan gaya hidup masyarakat berkelanjutan;
2. Peningkatan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis;
3. Mendukung reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
4. Peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang terintegrasi;
5. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi;
6. Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
7. Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa Kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau;
8. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana;
9. Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
10. Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan

bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi;

11. Mendukung Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang. pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.

Tabel 5.18
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 15

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
15	STE. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,6	0,708
		42. Kualitas Lingkungan Hidup		
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	81,75	88,90
		b) Pengelolaan Sampah		
		- Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1	84

16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Untuk memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu *FEW Nexus (Food, Energy, Water)*. **Diversifikasi dan konservasi energi dan air untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi dan air yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.** Arah kebijakan untuk mewujudkan adalah:

1. Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan air.
2. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir.

Transformasi sistem pangan menuju *eco-region* sistem pangan yang berkelanjutan, sehat dan tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Hal ini dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh individu;
- b. pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman;
- c. diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal untuk mendukung kemandirian pangan;
- d. penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK), masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah 3TP, atau terkena dampak bencana;
- e. penerapan pertanian konservasi, pertanian regeneratif, adaptif, dan rendah karbon; serta
- f. pengembangan *blue food* dan potensi sumber pangan alternatif lainnya.
- g. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif.
- h. Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat Kesehatan
- i. Penerapan teknologi *climate smart agriculture* melalui penyediaan bibit berkualitas.

- j. Pendidikan kemasyarakatan dalam rangka mendukung proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- k. Pendidikan Masyarakat yang produktif dalam rangka pengembangan tanaman pangan.
- l. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting.
- m. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat.

Tabel 5.19
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 16

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
16	STE.16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
		a) Ketahanan Energi		
		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	588	6.970
		- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	189	200
		b)Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9,05	0,53
		c. Ketahanan Air		
		- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,6	4,1
		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,29	100

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
		d. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	59,12	82,2

17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK. Penerapan jalur pembangunan yang rendah karbon dilaksanakan melalui arah kebijakan yang mencakup:

1. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan non struktural, ke siapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana.
2. Penguatan dan pemanfaatan teknologi untuk mitigasi dan resiko bencana.
3. Pengurangan risiko abrasi di pesisir dan kepulauan.
4. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim.
5. Pembatasan Pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana tinggi dan sangat tinggi.
6. Peningkatan sistem jaringan regional pada kawasan rawan bencana rendah dan kawasan bencana sedang.
7. Pengembangan kota palu sebagai kota taman bumi atau Palu *Geoprak city* dengan fungsi utama perdagangan, jasa dan industri, pendidikan dan riset kebencanaan, unggulan pariwisata berbasis geowisata dengan mitigasi bencana (Ripparkot Palu);

Tabel 5.20
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 17

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
17	STE. 17 Resiliensi Terhadap Bencana dan	44. Indeks Resiko Bencana (IRB) (untuk level	180,59	153,79-130,80

	Perubahan Iklim	provinsi)		
		45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
		a) Kumulatif	19,76	48,81
		b) Tahunan	28,94	76,27

E. Kerangka Implementasi Transformasi

18. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan Berkeadilan

Wilayah Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok pendapatan, serta kelompok rentan di wilayah perkotaan dan pedesaan, olehnya diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Mendorong pengembangan wilayah melalui pembentukan otonomi baru
2. Mendukung pengembangan Pelabuhan Pantoloan dan pelabuhan lainnya untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi untuk di Kawasan Timur Indonesia.
3. Mendukung pemanfaatan ALKI II di sisi wilayah Sulawesi bagian barat dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
4. Dukungan pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda.
5. Dukungan pengembangan bandara utama Mutiara SIS Al-Jufri serta bandara lainnya dan integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane termasuk untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas.
6. Mendukung penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk

mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara).

7. Mendukung pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang.
8. Sulawesi Tengah Sebagai Daerah Mitra IKN.
9. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah PASIGALA (Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi): (i) Pengembangan kawasan pemukiman penyangga disebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala, (ii) Peningkatan sistem jaringan pergerakan regional, (iii) Pengembangan sarana dan prasarana pemukiman regional di Kabupaten Donggala, (iv) Pengembangan jaringan sumberdaya air sebagai pengurangan resiko bencana likuifaksi.
10. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Agropolitan Bolipamuso dan KPN: (i) Hulu pengembangan pertanian berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, sebagian Kabupaten Sigi, sebagian Kabupaten Parigi Moutong, dan sebagian Kabupaten Donggala; (ii) Hilir produksi pertanian berupa pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasaran berada di pusat kegiatan yaitu Parigi Moutong sebagai agroindustri; dan Poso sebagai sentra agribisnis dan sentra agrowisata.
11. Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara.
12. Pengembangan infrastruktur pendukung agropolitan, agroindustri, agribisnis dan agrowisata.
13. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Balatoju (sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-Una) (i) Peningkatan kualitas obyek wisata bahari; pengembangan Kepulauan Togean sebagai Kawasan Destinasi Super Prioritas Nasional dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis pengurangan risiko bencana; (ii) Pembuatan

suatu paket terintegrasi antar wilayah melalui peningkatan jalur pelayaran; (iii) Penetapan kawasan perlindungan setempat; (iv) Perlindungan dan pengawasan terhadap potensi ekowisata bahari; (v) Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang sebagai upaya pengurangan risiko bencana tsunami; dan (vi) Peningkatan sarana prasarana pengembangan potensi perikanan dan pengolahannya.

14. Penguatan Sektor Pertanian, Peningkatan produktivitas sektor Perkebunan, serta pengembangan industry pengolahan sebagai penunjang ekonomi Pembangunan IKN.
15. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan.
16. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.
17. Mendorong pembangunan terusan khatulistiwa.

Tabel 5.21
Arah Pembangunan dan Indikator STE 8

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
	STE. 8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	a. Persentase Kondisi Mantap jalan Provinsi	69,19	97,36
		b. Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	0,70	0,85
		c. Indeks Williamsom	1,45	0,35

➤ **Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

1. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan kebijakan:

1. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
2. Mendukung optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
3. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
4. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui system terpusat di wilayah perkotaan.
5. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
6. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
7. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
8. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.
9. Mendukung pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
10. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Tabel 5.22

Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 15

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
	STE. 15 Lingkungan Hidup Berkualitas	Kualitas Lingkungan Hidup		
		<i>a) Persentase Luas Genangan yang tertangani (%)</i>	13	26,49
		<i>b) Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)</i>	7,16	50,00
		<i>c) Pengelolaan Sampah</i>		
		<i>- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)</i>	25	100
		<i>d) Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)</i>	32,53	47,31

2. Kestinambungan Pembangunan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasi dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh perangkat daerah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan Keputusan yang cermat dan

tegas. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah serta memastikan pelaksanaannya.

Upaya untuk mewujudkan Sulawesi Tengah Emas 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber pembiayaan, hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Adapun kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah terkait kesinambungan pembangunan adalah :

1. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
2. Mendukung penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.
3. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
5. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
6. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Tabel 5.23
Arah Pembangunan dan Indikator Sulawesi Tengah Emas 9

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
	STE 9. Regulasi Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	a. Persentase Pembiayaan Inovatif	5	50
		b. Nilai Maturitas Sistem	3.600	4.300

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET
			2025	2045
		Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)		
		Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah	81 - 90	91 - 100

5.1.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Selain arah kebijakan diatas, terdapat juga arah kebijakan pengembangan wilayah provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Sulawesi Tengah emas yakni Pembangunan berbasis kluster.



Gambar 5.2
Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah

Pembangunan dilakukan berbasis klaster perwilayahan seperti yang tertuang dalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 tahun 2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 - 2042, yaitu:

- Klaster Perkotaan Pasigala** meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi;
- Klaster Agropolitan** yaitu **Agropolitan Bolipamuso** dan **Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara**. Agropolitan Bolipamuso meliputi Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso; Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tolitoli;
- Klaster Industri Morubang** meliputi sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara; dan
- Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju** meliputi sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tojo Una-Una.

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastuktur wilayah sebagai upaya meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Upaya ini dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan tujuan penataan ruang Provinsi Sulawesi Tengah yaitu mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, sumber daya wilayah pesisir dan kelautan, industri, pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis mitigasi bencana.

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastuktur wilayah tersebut didapat ditempuh melalui: Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik Sulawesi Tengah. Serta Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah dengan tata Kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar yang berkualitas. Pencapaian tersebut ditandai dengan **menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Tengah serta meningkatnya pelayanan dasar perumahan** (air minum, sanitasi layak, rumah layak huni korban bencana, penanganan Kawasan kumuh dan ketersediaan listrik) **dan pekerjaan umum** (kemantapan jalan).

1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah PASIGALA (Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi)

Arahan konsep pengembangan perkotaan Pasigala adalah sebagai berikut:

- a. Pembatasan Pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana tinggi dan sangat tinggi;
- b. Pengembangan kawasan pemukiman penyangga disebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala;
- c. Peningkatan sistem jaringan regional pada kawasan rawan bencana rendah dan kawasan bencana sedang;
- d. Peningkatan sistem jaringan pergerakan regional;

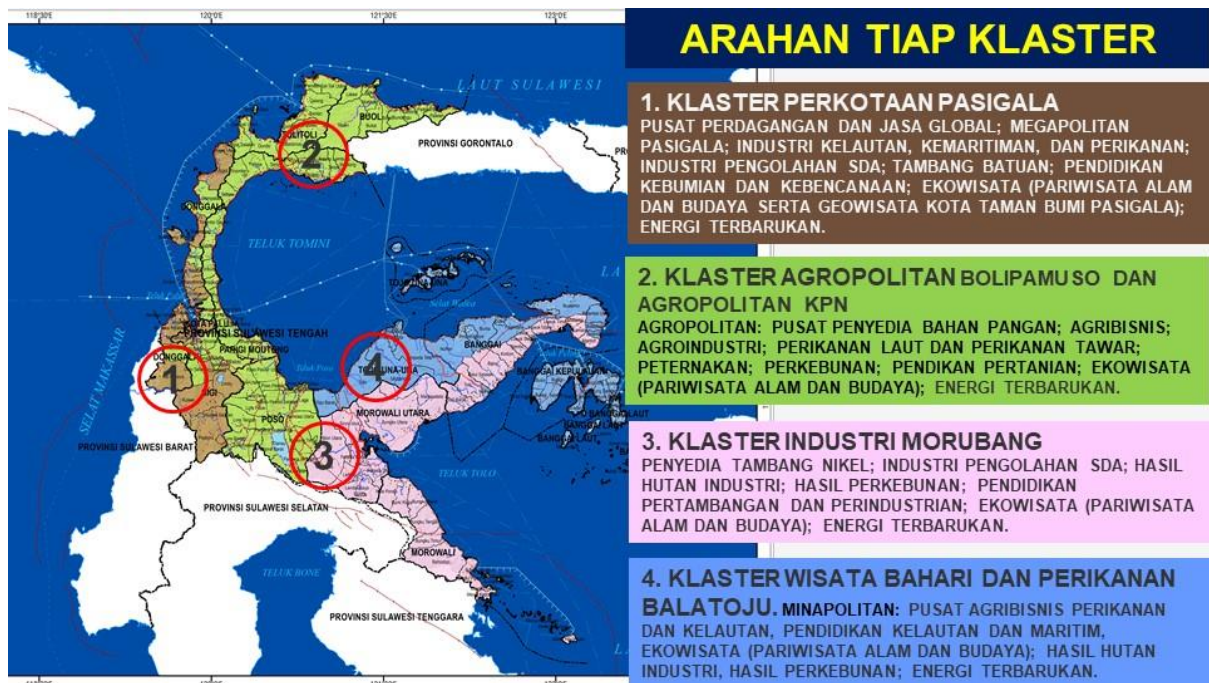
- e. Pengembangan kota palu sebagai kota taman bumi atau Palu Geoprak city dengan fungsi utama perdagangan, jasa dan industri, pendidikan dan riset kebencanaan, unggulan pariwisata berbasis geowisata dengan mitigasi bencana (Ripparkot Palu);
 - f. Pengembangan sarana dan parasarana pemukiman regional di Kabupaten Donggala;
 - g. Pengembangan jaringan sumberdaya air sebagai pengurangan resiko bencana likuifaksi.
2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Agropolitan Bolipamuso dan KPN
- Arahan konsep pengembangan Wilayah Klaster Agropilitas dan KPN adalah sebagai berikut:
- a. Hulu pengembangan pertanian berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, sebagian Kabupaten Sigi, sebagian Kabupaten Parigi Moutong, dan sebagian Kabupaten Donggala;
 - b. Hilir produksi pertanian berupa pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasaran berada di pusat kegiatan yaitu: (1) Parigi Moutong sebagai agroindustri; dan Poso sebagai sentra agribisnis dan sentra agrowisata.
 - c. Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara;
 - d. Pengembangan infrastruktur pendukung agropolitan, agroindustri, agribisnis dan agrowisata;
 - e. Percepatan pengembangan Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tolitoli.
3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Morubang (Morowali, Morowali Utara, dan Banggai), Arahan konsep pengembangan Wilayah Morubang adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan kawasan industri memiliki dampak *multiplier efect* terhadap pengembangan permukiman dan pusat kegiatan;
 - b. Hilirisasi perindustrian memerlukan aksesibilitas yang terpadu;
 - c. Penggunaan sabuk hijau terhadap pengembangan kawasan budidaya yang berbatasan dengan kawasan lindung;
 - d. Pengembangan sempadan pantai; dan
 - e. Pemulihan lahan bekas tambang sebagai kawasan hulu perindustrian tambang.

4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Balatoju (sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-Una)

Arahan konsep pengembangan Wilayah Klaster Balatoju adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas obyek wisata bahari; pengembangan Kepulauan Togean sebagai Kawasan Destinasi Super Prioritas Nasional dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis pengurangan risiko bencana;
- b. Pembuatan suatu paket terintegrasi antar wilayah melalui peningkatan jalur pelayaran;
- c. Penetapan kawasan perlindungan setempat;
- d. Perlindungan dan pengawasan terhadap potensi ekowisata bahari;
- e. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang sebagai upaya pengurangan risiko bencana tsunami; dan
- f. Peningkatan sarana prasarana pengembangan potensi perikanan dan pengolahannya.

Upaya Provinsi Sulawesi Tengah untuk berkontribusi dalam Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui pembangunan perwilayahan yang dielaborasi dari RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, kebutuhan pembangunan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penunjang ekonomi IKN, dan upaya pengembangan Sulawesi Tengah untuk mencapai Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045. Gambar berikut memperlihatkan arah kebijakan Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045.



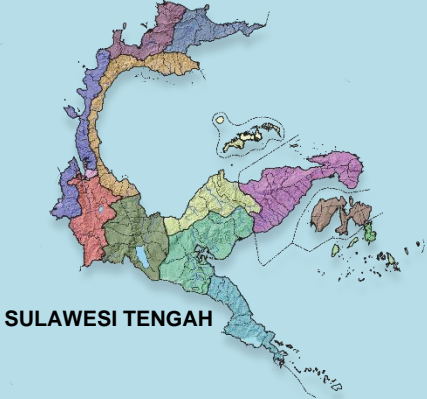
Gambar 5.3
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 Berdasarkan 4 Klaster Perwilayahan Provinsi Sulawesi Tengah

Detail dari Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045 terdiri atas 3 Pilar yang merupakan satu kesatuan dalam pengembangan tiap wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Sulawesi Tengah sebagai **Pusat Ekonomi Global KTI**.
2. Sulawesi Tengah sebagai **Penunjang Ekonomi IKN dan Industri Berbasis SDA**.
3. Sulawesi Tengah sebagai **Wilayah Indonesia yang Hijau, Ekologis, dan Produktif**.

Tabel berikut memperlihatkan penerapan 3 Pilar Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045.

Tabel 5.24
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045
untuk Indonesia Emas

 <p>SULAWESI TENGAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 01. Kota Palu 02. Kabupaten Sigi 03. Kabupaten Donggala 04. Kabupaten Buol 05. Kabupaten Toli-Toli 06. Kabupaten Parigi Moutong 07. Kabupaten Poso 08. Kabupaten Morowali 09. Kabupaten Morowali Utara 10. Kabupaten Banggai 11. Kabupaten Banggai Kepulauan 12. Kabupaten Banggai Laut 13. Kabupaten Tojo Una-Una
---	--

PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH SULTENG 2025-2045
1	<p>SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi layanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Stabilitas • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. <p><u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Produktivitas Agropolitan berbasis Pertanian Modern di BOLIPAMUSO, KPN • Minapolitan BALATOJU Berkelanjutan • Produktivitas Industri MORUBANG dan KEK PALU • Metropolitan PASIGALA pusat layanan perkotaan dan ekonomi global • <i>Geopark City</i> (Kota Taman Bumi) PASIGALA • Layanan kesehatan, RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Perdagangan dan jasa global • Layanan jasa pariwisata skala global.
2	<p>SULAWESI TENGAH sebagai PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA</p> <p><u>Pengembangan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan-Kawasan Agropolitan dan Minapolitan dengan konsep Pertanian Modern dengan produk: tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan • Kawasan-Kawasan Industri yang produktif dan dan KEK dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup • Kawasan-Kawasan Pariwisata (KSP dan KPP). <p><u>Produk:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan; Hasil industri berbasis SDA; Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
3	<p>SULAWESI TENGAH sebagai WILAYAH INDONESIA YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <p><u>Penerapan:</u></p> <p>Ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi; Mitigasi Bencana, Kota Hijau, dan Taman Bumi untuk pengembangan wilayah, kota yang aman, produktif dan berkelanjutan; pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.</p> <p><u>Pengembangan:</u></p> <p>Industri dan penggunaan energi terbarukan; transportasi publik ramah lingkungan dan terintegrasi antar wilayah; Riset ekologi, pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, kebumihan dan kebencanaan bertaraf internasional; Riset khusus pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil Sulteng; Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan; Peningkatan luasan RTH Publik dan RTH Privat pekarangan masyarakat, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, mengembangkan hutan produksi; Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, dan Produktif; Peningkatan kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK; Penguatan karakter & jati diri sebagai wilayah yang hijau, ekologis, dan produktif.</p>

Setiap wilayah memiliki kekhususan arah pengembangan wilayahnya. Tabel-tabel berikut memperlihatkan penerapan 3 Pilar Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045 berdasarkan setiap wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.25
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045



PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA PALU 2025-2045
1	<p>KOTA PALU Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, INDUSTRIALISASI KEMARITIMAN PERIKANAN DAN KELAUTAN, LAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PARIWISATA BERTARAF INTERNASIONAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi layanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum • Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan yang kuat dan mengayomi warga • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah <p><u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Metropolitan PASIGALA • Produktivitas KEK PALU, Ekraf, UMKM, Korporasi Masyarakat Sertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Pusat perdagangan dan jasa global • Kerjasama riset pariwisata, kebumihan dan kebencanaan bertaraf internasional • Sekolah vokasi, pendidikan tinggi kebumihan, kebencanaan, mitigasi, dan pariwisata • Layanan jasa pariwisata PASIGALA skala global.
2	<p>KOTA PALU MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA</p> <p><u>Perdagangan, Industri, dan Jasa</u></p> <p>Hulu-hilir hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, industrialisasi kemaritiman, kelautan dan perikanan, hasil hutan produksi, industri berbasis SDA, layanan pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.</p>
3	<p>KOTA PALU SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi • Pengembangan sebagai Kota Tangguh, Kota Pintar, Kota Taman Bumi (<i>Geopark City</i>): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan <i>Geopark</i> PASIGALA • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan energi terbarukan (matahari) • Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kota Palu terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kaawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 5.26
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sigi
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045



PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN SIGI 2025-2045
1	<p>KABUPATEN SIGI Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (PERDAGANGAN DAN JASA - AGROPOLITAN KPN: AGRIBISNIS dan AGROINDUSTRI; PARIWISATA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi layanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum • Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah <p>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Wilayah perkotaan sebagai bagian dari Metropolitan PASIGALA: Pusat Perdagangan dan jasa global • Agropolitan KPN berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perdagangan internasional, dan jasa lingkungan • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi <i>smart farming</i> dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata PASIGALA skala global • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	<p>KABUPATEN SIGI MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA.</p> <p>Perdagangan dan jasa: kesehatan, pendidikan, pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Lingkungan (PERKOTAAN PASIGALA); Produksi: Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, hutan produksi, pariwisata (Agropolitan KPN).</p>
3	<p>KABUPATEN SIGI SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan sebagai kota dan wilayah yang tangguh, Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat terintegrasi dengan rencana <i>Geopark</i> PASIGALA; Penanganan eks area bencana • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA. • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan Kebun Raya Sigi • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 5.27
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Donggala
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045



PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN DONGGALA 2025-2045
1	<p>KABUPATEN DONGGALA Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (PERDAGANGAN DAN JASA, AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI DAN PARIWISATA).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah <p><u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kota Donggala sebagai bagian dari Metropolitan PASIGALA: Perdagangan dan jasa global • Kawasan Agropolitan dan KPN berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • Produktivitas: EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset komoditas kelapa dan kakao, perdagangan internasional, jasa lingkungan, investasi dan pengembangan agropolitan Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi <i>smart farming</i> dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata Kabupaten Donggala terkoneksi dengan layanan pariwisata PASIGALA • Pengelolaan untuk kerja sama lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Pasar tematik dan ruang-ruang publik yang representatif di tiap kecamatan.
2	<p>KABUPATEN DONGGALA MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA.</p> <p><u>Perdagangan dan Jasa</u> : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, industrialisasi kemaritiman, perikanan dan kelautan. Hasil hutan produksi, layanan pendidikan, kesehatan, dan pariwisata (Perkotaan PASIGALA); <u>Produksi</u>: Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat hutan produksi, layanan pariwisata (Agropolitan KPN).</p>
3	<p>KABUPATEN DONGGALA SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi • Pengembangan sebagai kota dan wilayah yang tangguh; Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat terintegrasi dengan rencana <i>Geopark</i> PASIGALA; Penanganan eks area bencana • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Peremajaan pohon kelapa di wilayah pesisir • Penataan dan pengelolaan kawasan wisata: Kota Tua Donggala, <i>Sunset City</i> • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

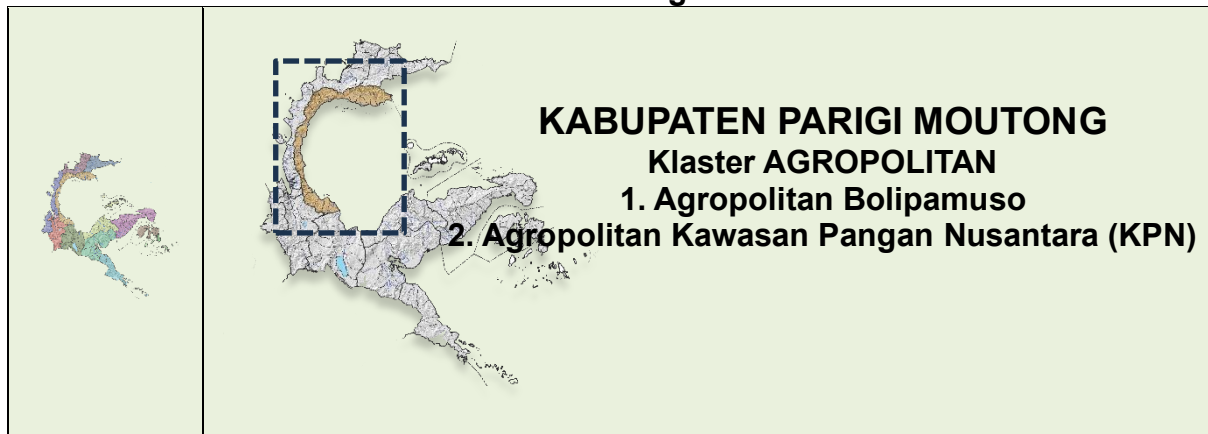
Tabel 5.28
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

	 <p>KABUPATEN BUOL Klaster AGROPOLITAN 1. Agropolitan Bolipamuso 2. Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)</p>
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BUOL 2025-2045
1	<p>KABUPATEN BUOL Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi agribisnis pertanian, perikanan, peternakan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah <p><u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan, perkebunan • Sekolah vokasi <i>smart farming</i> dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	<p>KABUPATEN BUOL MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA</p> <p><u>Suplai produk</u> : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, dan layanan pariwisata.</p>
3	<p>KABUPATEN BUOL SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura). Pengembangan Kebun Raya Buol • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 5.29
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tolitoli
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

	 <p align="center"> KABUPATEN TOLITOLI Klaster AGROPOLITAN 1. Agropolitan Bolipamuso 2. Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) </p>
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI 2025-2045
1	<p>KABUPATEN TOLITOLI Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi agribisnis pertanian, agroindustri)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. <p><u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan, perkebunan • Sekolah vokasi <i>smart farming</i> dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	<p>KABUPATEN TOLITOLI MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA</p> <p><u>Suplai produk</u> : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hasil hutan produksi, dan layanan pariwisata.</p>
3	<p>KABUPATEN TOLITOLI SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan agrowisata dan agroindustri cengkeh • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 5.30
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Parigi Moutong
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

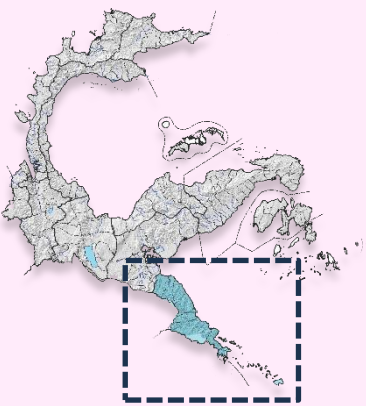


PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG 2025-2045
1	<p>KABUPATEN PARIGI MOUTONG Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI: AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi pertanian dan agribisnis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah <p><u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan • Sekolah vokasi <i>smart farming</i> dan lingkungan • Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	<p>KABUPATEN PARIGI MOUTONG MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA</p> <p><u>Suplai produk</u> : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, industrialisasi kemaritiman, perikanan dan kelautan, hasil hutan produksi, dan layanan pariwisata.</p>
3	<p>KABUPATEN PARIGI MOUTONG SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan Wisata Pertanian Tanaman Pangan dan Agrowisata Durian • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 5.31
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Poso
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

	 <p>KABUPATEN POSO Klaster AGROPOLITAN 1. Agropolitan Bolipamuso 2. Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)</p>
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN POSO 2025-2045
1	<p>KABUPATEN POSO Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI: AGROPOLITAN (AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI, DAN PARIWISATA); Sekolah vokasi pertanian, agribisnis, dan agroindustri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. <p><u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Agropolitan berbasis pertanian moderen: hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan • EKRAF, UMKM, dan Korporasi Masyarakat Bersertifikat ISO • Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional • Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional • Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan, agribisnis, agroindustri, perikanan, peternakan. Sekolah vokasi pertanian, agribisnis dan agroindustri • Riset pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil • Layanan jasa pariwisata BOLIPAMUSO terintegrasi • Kerja sama penanganan lahan tidur masyarakat menjadi lahan produktif • Penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
2	<p>KABUPATEN POSO MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA:</p> <p><u>Produk</u> : Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hasil hutan produksi, dan layanan pariwisata.</p>
3	<p>KABUPATEN POSO SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan • Pengembangan Negeri 1000 Megalit dan Geopark Danau Poso • Penerapan mitigasi bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga • Transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi di Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO • Peningkatan rasio RTH Publik, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan • Peningkatan rasio RTH Privat: pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura) • Pengembangan Wisata Tanaman Hortikultura Lembah Napu dan Sekitarnya • Bangunan, perumahan, permukiman hijau tahan gempa • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 5.32
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

	 <p>KABUPATEN MOROWALI Klaster Industri MORUBANG</p>
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MOROWALI 2025-2045
1	<p>KABUPATEN MOROWALI Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (INDUSTRI, PARIWISATA, SEKOLAH VOKASI DAN PENDIDIKAN TINGGI PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan • Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Digitalisasi pelayanan publik • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. <p><u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u></p> <p>Kawasan industri berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilirisasi hasil tambang • Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan • UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset pertambangan dan industri berkelanjutan • Riset dan pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi pertambangan dan industri • Layanan jasa pariwisata MORUBANG.
2	<p>KABUPATEN MOROWALI MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA</p> <p><u>Produk</u> : Hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; produk industri berbasis SDA dan layanan pariwisata terintegrasi pada Klaster MORUBANG</p>
3	<p>KABUPATEN MOROWALI SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi MORUBANG-BALATOJU • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.


Tabel 5.33
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Morowali Utara
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

	 <p>KABUPATEN MOROWALI UTARA Klaster Industri MORUBANG</p>
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 2025-2045
1	<p>KABUPATEN MOROWALI UTARA Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (INDUSTRI, PARIWISATA, SEKOLAH VOKASI DAN PENDIDIKAN TINGGI INDUSTRI)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah <p><u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u></p> <p>Kawasan industri berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilirisasi hasil tambang • Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan • UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset pertambangan dan industri berkelanjutan Riset dan pengembangan perkebunan kapas dan industri tekstil • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi industri • Layanan jasa pariwisata MORUBANG berkelanjutan
2	<p>KABUPATEN MOROWALI UTARA MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA</p> <p>Produk : Hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; produk industri berbasis SDA dan layanan pariwisata terintegrasi pada Klaster MORUBANG</p>
3	<p>KABUPATEN MOROWALI UTARA SEBAGAI WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang • Pengembangan dan Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.


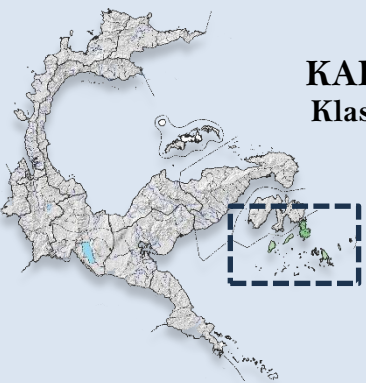
Tabel 5.34
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

	 <p align="center">KABUPATEN BANGGAI Klaster Industri MORUBANG Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU</p>
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI 2025-2045
1	<p>KABUPATEN BANGGAI Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (MORUBANG: Industri, Pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Lingkungan; BALATOJU: Perikanan, Kelautan, Pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. <p><u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u></p> <p>Kawasan industri berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilirisasi hasil tambang • Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan • UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset industri, perikanan dan kelautan, dan lingkungan • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi lingkungan, kelautan dan perikanan • Layanan jasa pariwisata MORUBANG-BALATOJU.
2	<p>KABUPATEN BANGGAI MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA</p> <p>Produk : Hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; produk industri berbasis SDA dan layanan pariwisata terintegrasi pada Klaster MORUBANG-BALATOJU.</p>
3	<p>KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI BAGIAN WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang di Klaster Industri MORUBANG • Pengembangan Kawasan Minapolitan yang Produktif dan Ekologis di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU • Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi MORUBANG-BALATOJU • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.



Tabel 5.35
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

	 <p align="center">KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU</p>
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2025-2045
1	<p>KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN, SEKOLAH VOKASI PERIKANAN DAN KELAUTAN, ARSITEKTUR MARITIM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. <p><u>Pengembangan Kawasan Minapolitan</u> Agribisnis hulu dan hilir produk kelautan dan perikanan <u>Pengembangan</u> UMKM, EKRAF, dan Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Kawasan Minapolitan • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset ekonomi biru dan bioekonomi • Sekolah vokasi perikanan dan kelautan • Layanan jasa pariwisata Banggai Kepulauan terintegrasi dengan pariwisata BALATOJU</p>
2	<p>KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKM DAN INDUSTRI BERBASIS SDA</p> <p><u>Produk</u> : Hasil perikanan dan kelautan; layanan pariwisata terintegrasi dengan pariwisata pada Klaster BALATOJU</p>
3	<p>KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SEBAGAI BAGIAN WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi biru dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan Kota Hijau, Kawasan Minapolitan yang produktif dan ekologis • Pengembangan arsitektur lokal bernuansa maritim yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 5.36
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

	 <p>KABUPATEN BANGGAI LAUT Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU</p>
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI LAUT 2025-2045
1	<p>KABUPATEN BANGGAI LAUT Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN, SEKOLAH VOKASI PERIKANAN DAN KELAUTAN, ARSITEKTUR MARITIM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. <p><u>Pengembangan Kawasan Minapolitan</u> Agribisnis hulu dan hilir produk kelautan dan perikanan <u>Pengembangan</u> • UMKM, EKRAF, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan - 297 - awasan- 297 -a dan - 297 -awasan- 297 -an taraf internasional • Riset ekonomi biru dan bioekonomi • Sekolah vokasi perikanan dan kelautan • Layanan jasa pariwisata Banggai Laut terintegrasi dengan pariwisata BALATOJU</p>
2	<p>KABUPATEN BANGGAI LAUT MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA.</p> <p><u>Produk</u> : Hasil perikanan dan kelautan; layanan pariwisata terintegrasi dengan pariwisata pada Klaster BALATOJU.</p>
3	<p>KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI BAGIAN WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi biru dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan Kota Hijau; Kawasan Minapolitan yang Produktif dan Ekologis; Pengembangan arsitektur lokal bernuansa maritim Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi - 297 -awasa ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas - 297 -awasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

Tabel 5.37
Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

	 <p>KABUPATEN TOJO UNA-UNA Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU</p>
PILAR	ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA 2025-2045
1	<p>KABUPATEN TOJO UNA-UNA Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (AGRIBISNIS PERIKANAN DAN KELAUTAN, SEKOLAH VOKASI PERIKANAN DAN KELAUTAN, ARSITEKTUR MARITIM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah. <p><u>Pengembangan Kawasan Minapolitan</u> Agribisnis hulu dan hilir produk kelautan dan perikanan <u>Pengembangan</u> • UMKM, EKRAF, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset ekonomi biru dan bioekonomi • Sekolah vokasi perikanan dan kelautan • Layanan jasa pariwisata Tojo Una-Una terintegrasi dengan pariwisata BALATOJU.</p>
2	<p>KABUPATEN TOJO UNA-UNA MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA</p> <p><u>Produk</u> : Hasil perikanan dan kelautan; layanan pariwisata terintegrasi dengan pariwisata pada Klaster BALATOJU.</p>
3	<p>KABUPATEN TOJO UNA-UNA SEBAGAI BAGIAN WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi biru dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan Kota Hijau; Kawasan Minapolitan yang produktif dan ekologis • Pengembangan arsitektur lokal bernuansa maritim yang unik, fungsional, atraktif, dan menarik wisatawan • Pengembangan Kepulauan Togean sebagai destinasi wisata super prioritas nasional yang ramah lingkungan • Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif • Peremajaan pohon kelapa di wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.

5.2. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2045

Sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif. Sasaran pokok Pembangunan daerah merupakan perumusan dan penentuan prioritas yang bersumber dari permasalahan Pembangunan daerah. Permasalahan Pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta yang akan dicapai dimasa akan datang dengan kondisi riil perencanaan.

Berdasarkan Visi Provinsi Sulawesi Tengah pada RPJPD Tahun 2025-2045 tersebut, berikut ini Sasaran Pokok yang akan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan dalam pentahapan atau periode Pembangunan dua puluh tahun sebagai Upaya penyamaan persepsi terhadap arah kebijakan dan sasaran pokok agar linearitas dengan Misi pada RPJPD. Berdasarkan uraian tentang Arah Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Transformasi daerah dan Indikator Utama Pembangunan Daerah hasil penyelarasan sebagaimana di atas, maka di rumuskan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2045, keterkaitan antara Misi, arah (tujuan) pembangunan dan sasaran pokok pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2045, serta penyelarasan RPJPN dan RPJPD yang berjumlah 8 (delapan) Misi, 17 arah (tujuan) pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan daerah disajikan melalui cascading/logical frame work dan tabel penyelarasan berikut ini :

Misi 1 : Transformasi Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing

STE.1 Kesehatan Untuk Semua

STE. 2 Pendidikan Berkualitas yang

STE. 3 Perlindungan sosial yang adaptif

Sasaran Pokok

Terwujudnya sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas dan merata yang menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing

Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif

Misi 2 : Transformasi Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

STE. 4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

STE.5 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau

STE. 6 Transformasi Digital

STE. 7 Integrasi Ekonomi Domestik

STE. 8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi

Sasaran Pokok

Terwujudnya industri pengolahan berbasis sumberdaya alam sebagai penggerak ekonomi yang berdaya saing

Terwujudnya ekonomi hijau sebagai pusat pertumbuhan baru melalui peluang kerja, investasi dan produk-produk hijau

Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital

Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang terintegrasi dan mendukung partisipasi rantai pasok global

Meningkatnya kualitas infrastruktur antar perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Misi 3 : Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas

**STE. 9 Regulasi dan Tata Kelola
yang berintegras dan adaptif**

Sasaran Pokok

**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang berintegritas dan adaptif**

Misi 4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

**STE 10. Hukum Berkeadilan,
Keamanan Provinsi Tangguh, dan
Demokrasi Substansial**

**STE 11. Stabilitas Ekonomi
Makro**

**STE. 12 Ketangguhan Diplomasi
dan Berdaya Gentar Kawasan**

Sasaran Pokok

**Terwujudnya supremasi hukum yang
berkeadilan, ketertiban dan
demokrasi substansial yang
mengemban amanah rakyat**

**Terwujudnya stabilitas ekonomi
makro yang diarahkan untuk
kesinambungan fiskal**

**Terwujudnya penguatan
kerja sama antar wilayah
dan swasta**

Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi

STE. 13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

STE 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

STE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas

STE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

STE 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran Pokok

Terwujudnya peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta terwujudnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

Terwujudnya ketangguhan keluarga dan masyarakat untuk terbentuknya sumberdaya manusia yang berdaya saing

Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup .

Terwujudnya kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air

Terwujudnya pembangunan rendah karbon untuk tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca dan ketahanan bencana

Misi 6 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

STE. 8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi

Sasaran Pokok

Meningkatnya kualitas, kuantitas infrastruktur dan konektivitas dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah

Misi 7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

STE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas

Sasaran Pokok

Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar perumahan yang ramah lingkungan

Misi 8 : Kestinambungan pembangunan

STE 9. Regulasi Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif

Sasaran Pokok

Terwujudnya sinkronisasi siklus manajemen pembangunan daerah yang berkesinambungan

Tabel 5.38
Penyelarasan Indikator utama Pembangunan RPJPN dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

No	Indikator Utama Pembangunan	RPJPN Tahun 2025 - 2045		Indikator Utama Pembangunan Daerah	RPJPD Tahun 2025 - 2045	
		Target RPJP Nasional			Target RPJPD Prov. Sulteng	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	80	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,64	78,30
2.	Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	176	22
	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,9	6,7
3.	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	274	76	Penanganan Tuberkulosis dan Eliminasi Schistosomiasis:		
				a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment Coverage) (%)	71	95
				b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	89,14	98,00
				C) Prevelensi Schistosomiasis <1	<1	<1
4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	99.5	99.5
5.	Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:		

No	Indikator Utama Pembangunan	RPJPN Tahun 2025 - 2045		Indikator Utama Pembangunan Daerah	RPJPD Tahun 2025 - 2045			
		Target RPJP Nasional			Target RPJPD Prov. Sulteng			
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
	a) Rata – rata Nilai PISA:			a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional				
				untuk:				
	- Membaca	396	485	- Literasi Membaca	7,69 - 7,69	69,23 - 69,23		
	- Matematika	404	490	- Numerasi	0,00 - 7,69	61,54 - 61,54		
	b) Rata – rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun)			9,46	12	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
						- Literasi Membaca	21,75 - 23,75	63,97 - 65,97
		- Numerasi	15,40 - 17,40			58,63 - 60,63		
	c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,37	14,81	c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.59 – 13.60	15.01 – 15.09		
				d) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,55 - 9,56	12,10 - 12,16		
				e) Angka Melek Huruf penduduk Usia diatas 15 Tahun (%)	99.28	100		
				f) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA Sederajat (%)	75	100		
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%).	12.57	12.57-14.67		

No	Indikator Utama Pembangunan	RPJPN Tahun 2025 - 2045		Indikator Utama Pembangunan Daerah	RPJPD Tahun 2025 - 2045	
		Target RPJP Nasional			Target RPJPD Prov. Sulteng	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	76,43	90,00
8.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	0,5 – 0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	11,06 – 11,56	0,30 – 0,80
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	44,1	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	30,33 – 33,86	80,96
10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	30	60	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	50
11.	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97 – 41,45	49,17 – 52,70
12.	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata		
	a) Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,32 – 0,45	0,76
	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	18	100	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)	4,07-8,38	10,18
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,3 -2019	5	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level provinsi (%)	13,10	17,17

No	Indikator Utama Pembangunan	RPJPN Tahun 2025 - 2045		Indikator Utama Pembangunan Daerah	RPJPD Tahun 2025 - 2045	
		Target RPJP Nasional			Target RPJPD Prov. Sulteng	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
				b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	1,31	3,25
	b) Rasio Kewirausahaan (%)	2,9 (Agst 2022)	8	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,82	6,19
	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,1 -2021	10	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,65	3,37
	d) Return on Aset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,26	5,48
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5	4	Penciptaan Lapangan Kerja Yang Baik		
				a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,25 – 2,94	1,56 – 2,57
				b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	70
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	70	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,30	69,5
17.	Tingkat Penguasaan IPTEK:			Tingkat Penguasaan IPTEK		
	a) Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persen PDB)	0,28 -2022	2,2 – 2,3	a) Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif
	b) Peringkat Indeks Inovasi Global (Peringkat)	75 -2022	30 besar			
18.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		

No	Indikator Utama Pembangunan	RPJPN Tahun 2025 - 2045		Indikator Utama Pembangunan Daerah	RPJPD Tahun 2025 - 2045	
		Target RPJP Nasional			Target RPJPD Prov. Sulteng	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
	a) Indeks Ekonomi Hijau	70,8	90,65	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	66,16	78,11
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	30,51	78,54
19.	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	51	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,3
20.	Biaya logistik (% PDB)	16,9 -2019	9	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,36	4,81
21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,8	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	42,4	34,44
22.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	26	40	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	77	91,13
23.	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
	a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	44,58	48,92	a. Kontribusi PDRB Provinsi	1,93	3,05
	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64	100	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	66,32	100
				c) Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	0,27	9,66
				d) Persentase Kondisi Mantap jalan Provinsi	69,19	97,36
				e) Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	0,70	0,85

No	Indikator Utama Pembangunan	RPJPN Tahun 2025 - 2045		Indikator Utama Pembangunan Daerah	RPJPD Tahun 2025 - 2045	
		Target RPJP Nasional			Target RPJPD Prov. Sulteng	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
				f) Indeks Wiliamson	1,45	0,35
24.	Indeks Materi Hukum	0,25	0,49	Indeks Reformasi Hukum	65 – 70	100
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	5	a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,35 “Baik”	5
				- Persentase Pembiayaan Inovatif	5	50
				b. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	3.600	4.300
				- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah	81 - 90	91 - 100
26.	Indeks Pelayanan Publik	3,87	5	Indeks Pelayanan Publik	3,48	5,00
				b. Indeks Reformasi Birokrasi	65	120
27.	Anti Korupsi			Anti Korupsi		
	a) Indeks Integritas Nasional	71,94 -2022	96,98	Indeks Integritas Nasional (Survey Penilaian Integritas (SPI))	70,58	85,02
	b) Indeks Persepsi Korupsi	34	60			
28.	Indeks Pembangunan Hukum:	0,6	0,84	Indeks Kualitas Kebijakan		
				c. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100
				d. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	80

No	Indikator Utama Pembangunan	RPJPN Tahun 2025 - 2045		Indikator Utama Pembangunan Daerah	RPJPD Tahun 2025 - 2045	
		Target RPJP Nasional			Target RPJPD Prov. Sulteng	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
		-2021				
29.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	62,8	80	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	53,25	70,63
		-2020				
30.	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi
31.	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,57	0,30
32.	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,0±1	Tingkat Inflasi (%)	3,46 – 4,6	1,2 - 3,8
33.	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a) Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	12,85	60,5
	b) Aset Dana Pensiun/ PDB (%)	7,6	60	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,03	0,88
				c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	3.094.537,51	28.533.530,53
	f) Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	d) Total Kredit/PDRB (%)	14,17	57,4
34.	Inklusi Keuangan (%)	91	98	Inklusi keuangan (9%)	85,05	97,49
35.	Asia Power Index <i>(Diplomatic Influence):</i>	60,4 -2023	75,0-80,0	Indeks Kepemimpinan Daerah	60 - 79	90 - 100

No	Indikator Utama Pembangunan	RPJPN Tahun 2025 - 2045		Indikator Utama Pembangunan Daerah	RPJPD Tahun 2025 - 2045	
		Target RPJP Nasional			Target RPJPD Prov. Sulteng	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
36.	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>):	14,6 -2023	45	Indeks Daya Saing Daerah	3,43	5
37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	52,52 – 52,59	60,99 – 61,62
38.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19	84,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,7 -77,74	85,16 – 85,61
39.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 -2022	80	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,33	71,07 – 71,1
				a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (skala 0-100)	60	70-80
				b. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per wanita)	2.12	2,2
				c. Angka Prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) (%)	65	100
				d. Persentase kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)	14	5
				e. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age Spesific Fertility Rate/ASFR) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun)	30/1000	5/1000
40.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 -2025	0,15	Indeks Ketgimpangan Gender (IKG)	0,446 – 0,444	0,212 – 0,196
41.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,35 -2020	0,75	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,6	0,708

No	Indikator Utama Pembangunan	RPJPN Tahun 2025 - 2045		Indikator Utama Pembangunan Daerah	RPJPD Tahun 2025 - 2045	
		Target RPJP Nasional			Target RPJPD Prov. Sulteng	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
42.	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup		
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,42	76,12	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	81,75	88,90
		-2020		b) Persentase Luas Genangan yang tertangani (%)	13	26,49
				c) Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	7,16	50
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	70	b) Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	32,53	47,31
	c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15	90	c) Pengelolaan Sampah		
		(13% Terdaur ulang)	(35% Terdaur ulang)	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1	84
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	25	100
43.	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	a) Ketahanan Energi			a) Ketahanan Energi		
	- Indeks Ketahanan Energi	6,61	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	2.250	6.970
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp	189	200

No	Indikator Utama Pembangunan	RPJPN Tahun 2025 - 2045		Indikator Utama Pembangunan Daerah	RPJPD Tahun 2025 - 2045	
		Target RPJP Nasional			Target RPJPD Prov. Sulteng	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
				milyar)		
	b) Prevalensi Ketidacukupan Pangan (%)	6,2	2,1	b)Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	9,05	0,53
	c) Ketahanan Air			d) Ketahanan Air		
	- Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	63,45	200	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,6	4,1
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,29	100
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	59,12	82,2
44.	Proporsi Kerugian Ekonomi akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	143,44	116,90 – 94,24
45.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a. Kumulatif	28,12	51,51	a) Kumulatif	19,76	48,81
	b. Tahunan	32,65	80,98	b) Tahunan	28,94	76,27

Keterkaitan Sasaran Pokok dengan Arah Pembangunan daerah dan Indikator Utama Pembangunan Daerah dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2045 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.39
Keterkaitan Misi, Arah (tujuan) Pembangunan, Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah
RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

NO.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	BASELINE	Target Sasaran			
					2025-2029		2030-2034	2035-2039	2040-2045
					2025	2029	2034	2039	2045
1	2	3	4	5	6				
1	<i>Transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing</i>	STE1. Kesehatan Untuk Semua	Terwujudnya sistem kesehatan yang tangguh dan responsif	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71.64	72.96	74.61	76.26	78.3
				2. Kesehatan Ibu dan Anak					
				a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	176	132.7	98.2	63.7	22
				b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23.9	18.0	12.7	9.0	6.7
				3. Penanganan Tuberkulosis dan Eliminasi Schistosomiasis:					
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	71	80	85	90	95
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	89,14	90,91	93,13	95,34	98
				c. Prevelensi Schistosomiasis	<1	<1	<1	<1	<1
				4. Cakupan kepesertaan amanan kesehatan Provinsi (%)	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
		STE 2.	Terwujudnya	5. Hasil Pembelajaran:					

NO.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	BASELINE	Target Sasaran			
					2025-2029		2030-2034	2035-2039	2040-2045
					2025	2029	2034	2039	2045
		Pendidikan Berkualitas Yang Merata	pendidikan yang berkualitas dan merata yang menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing	a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional, untuk:					
				- Literasi Membaca	7,69 – 7,69,	20,00	35,38	50,77	69,23 – 69,23
				- Numerasi	0,00 – 7,69	18,46	31,9225	45,385	61,54 – 61,54
				b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
				- Literasi Membaca	21,75 - 23,75	30,19-32,19	40,75-42,75	51,30-53,30	63,97 - 65,97
				- Numerasi	15,40 - 17,40	24,05-26,05	34,85-36,85	45,66-47,66	58,63 - 60,63
				c. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.60 – 13.70	13,78-13,98	14,01-14,33	14,23-14,67	14.50 – 15.09
				d. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,55 - 9,56	10,06-12,68	10,70,13,33	11,34-13,98	12,10 - 12,16
				e. Angka Melek Huruf penduduk Usia diatas 15 Tahun (%)	99.28	99.46	99.64	99.82	100
				e. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA Sederajat (%)	75	81.25	87.5	93.75	100
				6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%).	12.57	13.10	13.62	14.15	12,57 - 14,67
				7. Persentase pekerja lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Bekerja di Bidang	76.43	79,14	82,54	85,93	90.00

NO.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	BASELINE	Target Sasaran			
					2025-2029		2030-2034	2035-2039	2040-2045
					2025	2029	2034	2039	2045
2	<i>Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan</i>	STE 3. Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Keahlian (%)					
				8. Tingkat Kemiskinan (%)	11,06 - 11,56	9,92 - 11,06	8,28 - 9,92	6,64 - 8,28	0,30 - 0,80
				9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	30,33 – 33,86	42.99	55.65	68.30	80.96
				10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	27.5	35	42.5	50
		STE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas ekonomi	Terwujudnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam sebagai penggerak ekonomi yang berdaya saing	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97 – 41,45	47,00 - 50,99	51,00 - 52,82	50,0 - 51,68	49,17 - 52,70
				12. Pengembangan Pariwisata:					
				a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,32-0,45	0,51	0,59	0,67	0,76
				b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)	4,07-8,38	8,74	9,19	9,64	10.18
				14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
				a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	13.10	13,91	14,93	15,95	17.17
				b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	1.31	2,12	3,14	4,16	3.25
				c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2.82	3,49	4,34	5,18	6.19
				d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0.65	1,19	1,87	2,55	3.37

NO.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	BASELINE	Target Sasaran			
					2025-2029		2030-2034	2035-2039	2040-2045
					2025	2029	2034	2039	2045
				e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2.26	2,90	3,71	4,51	5.48
				15. Penciptaan Lapangan Kerja Yang Baik					
				a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,25 - 2,94	2,11	1,94	1,76	1.56 – 2.57
				b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	42,00	50,75	59,50	70
				16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58.3	61.1	63.9	66.7	69.5
				17. Tingkat Penguasaan Iptek :					
				Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		STE 5. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	terwujudnya ekonomi hijau sebagai pusat pertumbuhan baru melalui peluang kerja, investasi dan produk - produk hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
				a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	66.16	70.22	75.43	76.4	78.11
				b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	30.51	42.52	54.53	66.53	78.54
		STE 6. Transformasi Digital	Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3
		STE 7. Integrasi Ekonomi Domestik	terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang	20. Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi	7.36	5.96	4.56	3.16	4.81
				21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	42.4	40,81	38,82	36,83	34.44

NO.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	BASELINE	Target Sasaran			
					2025-2029		2030-2034	2035-2039	2040-2045
					2025	2029	2034	2039	2045
		STE 8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	terintegrasi dan mendukung partisipasi rantai pasok global	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Tingkat Provinsi	77	79,83	83,36	86,89	91.13
			meningkatnya kualitas infrastruktur antar perkotaan dan perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
				a. Kontribusi PDRB Provinsil (%)	1,93	2,15	2,43	2,71	3,05
				b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	66.32	73,06	81,48	89,90	100
				c. Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	0.27	2.62	4.97	7.31	9.66
3	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	STE 9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	65 - 70	76,0	83,5	91,0	100
				25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.35 "Baik"	3.65	4.15	4.65	5.00
				26. Indeks Pelayanan Publik	3.48	3,78	4,16	4,54	5.00
				a. Indeks Reformasi Birokrasi	65	75	87	100	120
				27. Anti Korupsi					
				Survey Penilaian Integritas (SPI)	70.58	73,47	77,08	80,69	85.02
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi substansial dan Stabilitas	STE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Provinsi Tangguh, dan Demokrasi	Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, ketertiban dan demokrasi	28. Indeks Kualitas Kebijakan	50.55 – 62.0	64,91	68,55	72,19	76.55
				a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	76,0	83,50	91,00	100

NO.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	BASELINE	Target Sasaran			
					2025-2029		2030-2034	2035-2039	2040-2045
					2025	2029	2034	2039	2045
	Ekonomi Makro Daerah	Substansial	substansial yang mengemban amanah rakyat	b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	64	69	74	80
				29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	53.25	56,73	61,07	65,42	70.63
				30. Indeks Demokrasi Indonesia	(> 80) Tinggi	82.5	85.0	87.5	90.0 Tinggi
		STE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk kesinambungan fiskal	31.Rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHK (%)	0.57	0,52	0,45	0,38	0.30
				32. Tingkat Inflasi (%)	3.6 – 4.6	3,12-4,44	2,52-4,24	1,92-4,04	1.2 – 3.8
				33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
				a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	12.85	24.76	36.68	48.59	60.5
				b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0.03	0.05	0.06	0.07	0.88
				c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	3.094.537,51	8.182.336.11	14.542.084,37	20.901.832,62	28.533.530,53
				d. Total Kredit/PDRB (%)	14.17	22,82	33,62	44,43	57.4
				34. Inklusi keuangan (%)	85.05	88.16	91.27	94.38	97.49
		STE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan	Terwujudnya penguatan kerja sama antar wilayah dan swasta	35. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	60-79	66-83,20	73,50-88,45	81,0-93,70	90 - 100
				36. Indeks Daya Saing Daerah	3.43	3.82	4.22	4.61	5
5	Ketahanan Sosial Budaya	STE 13. Beragama	Terwujudnya peran agama	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	52.52 – 52.59	54,21-54,28	56,33-56,40	58,45-58,52	60.99 – 61.62

NO.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	BASELINE	Target Sasaran			
					2025-2029		2030-2034	2035-2039	2040-2045
					2025	2029	2034	2039	2045
	<i>dan Ekologi</i>	Maslahat dan berkebudayaan Maju	sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta terwujudnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77.7 – 77.74	79,19-79,31	81,06-81,28	82,92-83,25	85.16 – 85.61
				39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66.33	67,284	68,4765	69,669	71.07 – 71.1
		STE 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terwujudnya ketangguhan keluarga dan masyarakat untuk terbentuknya sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (skala 0-100)	60	64	69	74	80
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per wanita)	2.12	2.14	2.16	2.18	2.2
				Angka Prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) (%)	65	73.75	82.5	91.25	100
				Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age Specific Fertility Rate/ASFR) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun)	30/1000	23/1000	18/1000	11/1000	5/1000
				Persentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)	14	11.75	9.5	7.25	5
				40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.446 – 0.444	0,399-0,394	0,341-0,332	0,282-0,270	0.212 – 0.196

NO.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	BASELINE	Target Sasaran			
					2025-2029		2030-2034	2035-2039	2040-2045
					2025	2029	2034	2039	2045
		STE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	41. Indeks Pengelolaan Keragaman Hayati Daerah	0.6	0.627	0.654	0.681	0.708
				42. <i>Kualitas Lingkungan Hidup</i>					
				a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	81.75	83,18	84,97	86,76	88.90
				b. Pengelolaan Sampah					
				- Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1	17,6	38,35	59,1	84
		STE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Terwujudnya kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan					
				a) Ketahanan Energi					
				- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	2.250	3,43	4,61	5,79	6,97
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	189	191.75	194.5	197.25	200
				b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9.05	7,33	5,19	3,05	0.53
				c. Ketahanan Air					
				- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0.6	1,3	2,18	3,05	4.1
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30.29	44,23	61,66	79,09	100

NO.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	BASELINE	Target Sasaran				
					2025-2029		2030-2034	2035-2039	2040-2045	
					2025	2029	2034	2039	2045	
		STE 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya pembangunan rendah karbon untuk tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca dan ketahanan bencana	d. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	59,12	63,74	69,51	75.28	82,2	
				44. Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	588	1864	3460	5055	6970	
				45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
				a) Kumulatif	19.76	24.54	31.22	38.86	48.81	
				b) Tahunan	28.94	40.74	51.46	63.7	76.27	
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	STE. 8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas, kuantitas infrastruktur dan konektivitas dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah	a. Persentase Kondisi Mantap jalan Provinsi	69,19	74,82	81,87	88,91	97,36	
				b. Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	0.7	0.718	0.778	0.856	0.85	
				c. Indeks Wiliamson	1.45	1.18	0.90	0.63	0.35	
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	STE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar perumahan yang ramah lingkungan	Kualitas Lingkungan Hidup						
				a) Persentase Luas Genangan yang tertangani (%)	13.00	16.88	20.80	23.84	26.49	
				b) Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	80.83	93.87	100	100	100	
				c) Pengelolaan Sampah - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	25	40	58,75	77,5	100	

NO.	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	BASELINE	Target Sasaran				
					2025-2029		2030-2034	2035-2039	2040-2045	
					2025	2029	2034	2039	2045	
				Presentase rumah tangga hunian layak (%)	32,53	35,49	39,18	42,88	47,31	
8	<i>Kesinambungan pembangunan</i>	STE 9. Regulasi Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan inovasi pembiayaan pembangunan daerah	a. Persentase Pembiayaan Inovatif	5	16.25	27.5	38.75	50	
				b. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	3.600	3.775	3.95	4.125	4.300	
				c. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah	91	92	94	97	100	

Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)

Game Changer dapat di artikan sebagai sesuatu hal yang dapat menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap suatu Tindakan atau cara berfikir. Dengan demikian Upaya *transformative* super prioritas Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2045 dapat di maknai sebagai Tindakan, kegiatan atau transformasi pada bidang tertentu yang super prioritas untuk di laksanakan, karena akan berdampak besar terhadap perwujudan Sulawesi Tengah Emas 2045 sebagai daerah industry berbasis Sumber Daya Alam, dengan Transformasi menyeluruh diberbagai bidang Pembangunan (Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Tranformasi Tata Kelola) yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun upaya Transformatif super prioritas di maksud adalah sebagai berikut:



Gambar 5.4

Game Changers RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah